



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI**

---

Tahun Sidang	:	2019 – 2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	22
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat dengan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;</li><li>2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan</li><li>3. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.</li></ol>
Hari, Tanggal	:	Senin, 16 Desember 2019
Pukul	:	10.45 s.d. 14.30 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Ketua Rapat	:	Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F.NasDem).
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Gedung Nusantara II Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membahas Prospek Pengembangan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat; dan</li><li>2. Lain-lain.</li></ol>

Anggota DPR yang : Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
Hadir

**F-PDIP**

1. SUDIN, S.E.
2. SUNARNA, S.E., M.Hum.
3. Drs. I MADE URIP, M.Si.
4. Ir. EFFENDI SIANIPAR
5. ONO SURONO, S.T.
6. H. YADI SRIMULYADI
7. VITA ERVINA, S.E., M.B.A.
8. Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.
9. KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
10. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.

**F-PG**

1. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
2. FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
3. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.
4. BUDHY SETIAWAN
5. Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.
6. ALIEN MUS

**F-GERINDRA**

1. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
2. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
3. Ir. SUMAIL ABDULLAH
4. Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.
5. Ir. H.T.A. KHALID, M.M.

**F-NASDEM**

1. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.
2. H. SULAEMAN L. HAMZAH
3. Ir. ABDULLAH TUASIKAL
4. YESSY MELANIA, S.E.

**F-PKB**

1. DANIEL JOHAN, S.E.
2. H. MUHTAROM, S.Sos.
3. EDWARD TANNUR, S.H.

**F-PD**

1. Dr. SUHARDI DUKA, M.M
2. Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.
3. Hj. NUR'AENI, S.Sos, M.Si.
4. MUSLIM, S.HI., M.M.
5. BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.

**F-PKS**

1. dr.h. SLAMET
2. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.
3. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
4. H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
5. Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

**F-PAN**

1. H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.
2. HAERUDIN, S.Ag., M.H.

**F-PPP**

1. EMA UMIYYATUL CHUSNAH

**JALANNYA RAPAT:**

**(RAPAT DIMULAI PUKUL 10:30 WIB)**

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua

**Yang terhormat Pimpinan Komisi IV dan segenap anggota Komisi IV DPR RI,**

**Yang saya hormati Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian beserta jajaran,**

**Yang saya hormati Saudara Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan beserta jajaran,**

**Yang saya hormati Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),**

**Serta hadirin sekalian yang berbahagia.**

Mengawali rapat pada pagi hari ini, marilah kita memajatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahuwata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidangn 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 18 Oktober 2019 dan Keputusan Rapat Interen Komisi IV DPR RI tanggal 31 Oktober 2019. Pada pagi hari ini Senin, 16 Desember 2019, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan RDP dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Direktur Utama BPDPKS dalam rangka membahas Prospek Pengembangan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat dan lain-lain.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI, saat ini RDP Komisi IV DPR RI telah dihadiri dan ditandatangani oleh 18 anggota DPR RI Komisi IV yang terdiri dari 6 fraksi dari 9 fraksi. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, RDP hari ini belum kuorum dan untuk itu kami skors 1 sampai dengan 5 menit.

**(RAPAT DI SKORS)**

**(SKORS DI CABUT)**

**Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia**

RDP pada pagi hari ini dimulai pukul 10.35 dan akan diakhiri pada pukul 13.30. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan dengan Pasal 226 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR atau kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Pimpinan;
2. Penjelasan para Dirjen dan Dirut BPDPKS terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan anggota Komisi;
4. Jawaban para Dirjen;
5. Kesimpulan;
6. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

**(RAPAT: DISETUJUI)**

**Hadirin yang berbahagia.**

Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 93 menyatakan bahwa salah satu dari 3 sumber pembiayaan adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha perkebunan yang berasal dari penghimpunan dan dana pelaku usaha perkebunan. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan dan /atau sarana dan prasarana perkebunan untuk melaksanakan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dimana Pemerintah membentuk suatu badan pengelola dana untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana atas komoditas perkebunan strategis.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis dan sangat berperan penting bagi perkebunan nasional sehingga tidak jarang komoditas kelapa sawit disebut salah satu komoditas primadona dan dikelola secara luas baik oleh masyarakat maupun korporasi. Namun dalam pengelolaannya

masih terdapat sejumlah masalah diantaranya legalitas perizinan, harga jual sawit, sulitnya akses *replanting* hingga minimnya pendampingan terkait dengan budidaya kelapa sawit yang tepat.

Komoditas kelapa sawit Indonesia juga mengalami kesulitan pemasaran di luar negeri akibat citra negatif kelapa sawit produksi Indonesia terhadap kerusakan lingkungan. Selain itu keterlambatan pembenahan dalam tata kelola menjadi hambatan dalam pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat yang diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mendesain perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan. Hingga saat ini implementasi program PSR masih belum dirasakan sepenuhnya oleh petani sawit.

Beberapa permasalahan tersebut kami peroleh saat RDP Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Gabungan Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Perkebunan serta PT Perkebunan Nusantara Holding beberapa hari yang lalu.

#### **Hadirin sekalian yang berbahagia.**

BPDPKS dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung ketercapaian upaya mewujudkan sawit berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Jo Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pemerintah memberikan tugas kepada BPDPKS melalui untuk menghimpun, mengembangkan, dan menggunakan dana perkebunan kelapa sawit bagi kemaslahatan industri sawit.

Sebagai tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya, pada RDP hari ini Komisi IV DPR RI ingin mendengarkan penjelasan secara mendetil dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan Direktur Utama BPDPKS antara lain mengenai dukungan peremajaan sawit rakyat, peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasana riset dan promosi. Secara khusus Komisi IV DPR RI juga ingin mengetahui kinerja BPDPKS serta lokasi penyaluran dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun. Setelah itu, hari ini Komisi IV juga meminta para mitra untuk memberikan pandangan-pandangannya, masukan, maupun solusi yang berkaitan dengan pengembangan peremajaan kelapa sawit rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani plasma maupun swadaya.

#### **Bapak/Ibu yang saya hormati.**

Demikianlah pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada para Dirjen dan Direktur Utama BPDPKS untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Kami persilakan.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc.):**

Baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Bapak/Ibu sekalian selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Bapak Ketua Komisi IV DPR RI.**

**Yang terhormat para Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.**

**Bapak/Ibu sekalian seluruh anggota Komisi IV DPR RI.**

**Pak Dirjen Perbendaharaan, Pak Direktur Utama Pengelolaan Dana**

**Perkebunan Kelapa Sawit/**

**Serta hadirin sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahuwata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa hadir pada Rapat Dengar Pendapat berkaitan dengan peremajaan sawit rakyat. Bapak Pimpinan, seluruh anggota kami sampaikan terima kasih atas undangan ini untuk bisa lebih mendetilkan sebagai tindaklanjut dari RDP beberapa hari yang lalu.

**Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian.**

**Anggota, Pak Dirjen dan Pak Dirut yang kami hormati.**

Peremajaan sawit rakyat sebagaimana sudah kami jelaskan di dalam RDP beberapa waktu yang lalu. Kita akan fokuskan pada satu areal perkebunan kelapa sawit kita yang potensi untuk diremajakan adalah 2,4 juta hektar. Dari luas tersebut pada tahun 2017, kita mengidentifikasi sawit rakyat kita 5,61 juta hektar. Dari 5,61 itu 2,4 juta perlu diremajakan. Kami mengidentifikasi juga di dalam kerangka untuk nanti lebih mendetilkan pelaksanaan PSR di lapangan. Kami juga menggunakan data-data yang berkaitan dengan proyek-proyek yang lalu seperti hanya Plasma PIR-BUN, kemudian Plasma PIR-TRANS yang di situ..

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Pimpinan. Intrupsi Pak Dirjen.

Saya mau tanya. Itu target 2018 seluas 185 ribu hektar tercapai?

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc.):**

Izin Pak Ketua,

Dari target itu tercapai 34 ribu pada saat itu.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Ya harusnya dicantumkan Pak Dirjen. Target 185 yang tercapai 34 ribu hektar. Jadikan, kami kan kalau bicara target mungkin kalau 2017 ya masuk akal lah kalau 20 ribu. Kemudian 2018 asal kekumpul 5 ribu dicantumkan juga Pak.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc.):**

Pak Pimpinan, izin.

Nanti di *slide* nomor 6, Bapak. Baik, kami lanjutkan.

Di 2017 bahwa Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI kami laporkan ada target 20.780 hektar, kemudian 2018 185.000 hektar, 2019 ada koreksi dari 200.000 menjadi 180.000 hektar. Sehingga nanti selama 2020-2032 kita akan menghadirkan setiap tahun rata-rata 180.000 hektar potensi untuk diremajakan. Terus kalau kita lihat data spasialnya, Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian para anggota. Ini target peremajaan sawit di 2019, 180 itu tersebar di Sumatera 122.682 hektar. Ada di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, dan Bangka Belitung. Kemudian di Jawa 2.005 hektar, Kalimantan 34.375 hektar, Sulawesi 18.690 hektar, Papua 2.248 hektar. Sehingga totalnya 180.000 hektar tersebar di 21 provinsi dan 103 kabupaten.

**Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.**

Untuk mempercepat itu, kami melakukan satu simplifikasi persyaratan. Dari persyaratan sebelumnya 14 syarat, kami pangkas menjadi 8 syarat untuk memudahkan rakyat kita untuk akses kepada program PSR kita. Dari 14 sebelumnya menjadi 8 itu, 1 diantaranya adalah penetapan daripada kelembagaan atau kebun. Kemudian juga persyaratan teknis yang berkaitan usulan untuk bisa *men-cover* 50 hektar dalam radius 10 kilometer. Ini perlu ada nanti peta daripada lokasi yang akan diremajakan.

Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya kita ada persyaratan nomor 5 sesungguhnya itu bisa dibuat satu persyaratan yang memperingan lagi surat tanda daftar budidaya atau surat kesanggupan menyelesaikan STDB. Seandainya pada saat mengusuli tersebut belum ada STDB, kami proses tetapi dia punya surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan STDB. Dari 8 persyaratan itu, Bapak/Ibu Ketua dan Anggota DPR RI. Pun kami juga melakukan simplifikasi prosedur. Prosedurnya sebelumnya di setiap *stage* di kabupaten di sertifikasi di provinsi di verifikasi, di pusat di verifikasi. Kami rubah hanya sekali di verifikasi tapi kami membuat satu tim verifikasi terintegrasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Sehingga prosesnya bisa diuber, dipercepat.

Kemudian seterusnya. Ini Bapak Ketua, tadi disampaikan target dan realisasinya. Ini kami sampaikan di *slide* nomor 6 ini dari target dan juga realisasi yang kita bisa lihat dari perspektif rekomendasi teknis dan juga transfer dananya dari BPDPKS. Pada tahun 2017 Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, kita teruskan. 20.780 terealisasi 14.634. Kemudian 2018 185.000 terealisasi 33.842 dari perspektif realisasi rekomendasi teknis sebagai daripada tugas yang kami laksanakan di Direktorat Jenderal Perkebunan. Kemudian di 2019 kami menargetkan 180.000 kami laporkan per 23 Oktober kemarin sudah mencapai 68.427 rekomendasi teknis. Kalau ini kita total Bapak Ibu, Ketua, dan Anggota Komisi IV DPR RI. Totalnya ada 116.903.

Kemudian memang ada satu verifikasi kembali untuk nanti transfer dana yang akan dijelaskan Pak Direktur BPDPKS sehingga saat kami *report* 23 Oktober tersebut Rp 1,7 triliun. Itu yang berkaitan dengan rekomendasi teknis dan transfer dana BPDPKS yang kalau kita kaitkan dengan target, Pak Ketua dan Bapak/Ibu sekalian. Masih juga sangat jauh. Oleh karena itu kami melakukan beberapa perbaikan daripada manajemen, daripada rekomendasi teknis seperti tadi. Salah satunya adalah men-simplifikasi daripada persyaratan dan juga prosedur mengenai pengusulan PSR ini.

Demikian, Bapak Ketua secara singkat kami sampaikan yang berkaitan dengan PSR ini. Secara teknis juga kami mengevaluasi dan menyiapkan tentunya ketersediaan daripada benih sawit kita untuk kebutuhan daripada *replanting* daripada sawit di lokasi yang sudah ditargetkan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

*Walaikumsalam.*

Silakan Pak Direktur Utama, silakan. Oh Pak Dirjen dulu.

**DIRJEN PERBENDAHARAAN KEMENKEU (Dr. ANDIN HADIYANTO, S.E., M.A.):**

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*  
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Bapak Pimpinan Komisi IV dan para Anggota Komisi IV yang kami hormati.**

Nama saya Andin Hadiyanto, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas undangan di dalam rapat ini dalam rangka mengenai upaya dan tantangan program peremajaan kelapa sawit. Nanti yang akan presentasi mengenai hal ini akan dilakukan oleh Bapak Direktur Utama PDBPKS. Mohon izin kami akan



menyampaikan pengantarnya kaitan Dirjen Perbendaharaan dengan BPDPKS Pak.

Jadi tugas Dirjen Perbendaharaan adalah menatausahakan penataan APBN untuk semua Kementerian/Lembaga yang kemudian juga menyalurkan dana fisik dan dana desa, juga membuat laporan pertanggungjawaban hingga laporan diaudit oleh BPK, laporan keuangan Pemerintah Pusat menjadi tanggung jawab kami. Kemudian selain itu juga Dirjen Perbendaharaan menjadi pembina seluruh BLU di Indonesia yang jumlahnya saat ini ada 234. Nah salah satunya adalah BLU BPDPKS ini dan kebetulan BLU BPDPKS ini adalah BLU pengelola dana. Sehingga Kementerian Keuangan tidak hanya menjadi pembina keuangan tetapi juga menjadi Pembina teknis atas BLU BPDPKS ini. Artinya BLU Sawit ini ada di bawah naungan atau di bawah Satker Perbendaharaan. Sehingga ini kenapa di perbendaharaan? Karena BLU ini adalah mengelola dana yang anggotanya melibatkan berbagai macam instansi. Ada 8 Menteri yang terlibat dan itu waktu pembentukannya diserahkan di Kementerian Keuangan.

Jadi BLU BPDPKS ini atau BLU Sawit ini dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Perkebunan seperti yang Bapak Pimpinan sampaikan. Di situ disebutkan bahwa penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan dapat dilakukan dihimpun melalui Undang-Undang Perkebunan ini. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara disebut bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Dan ini juga selaras dengan Undang-Undang PNBPN di salah satu poin di Undang-Undang PNBPN menyebut bahwa penerimaan lainnya diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Artinya diatur di Undang-Undang Perkebunan ini. Dan ini konstruksinya adalah Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang PNBPN, dan boleh menerima dari selain pajak dan bukan pajak asal diatur di Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Perkebunan.

Asal usul daripada BLU BPDPKS ini pada dasarnya juga menunjukkan keberpihakan Pemerintah kepada petani dan pelaku usaha di bidang sawit kenapa keberpihakan? Karena dana yang dihimpun daripada pelaku usaha seperti sawit ini juga digunakan langsung untuk petani dan juga pelaku usaha sawit. Ini berbeda dengan pihak luar atau pungutan ekspor yang lain yang mana uangnya masuk ke kas negara dan menyambut dengan yang lain sehingga kalau Kementerian mau memakai dia harus mengusulkan dalam hibahnya masing-masing. Sehingga ini sebenarnya dari awal sudah Pemerintah, Kementerian Keuangan memberikan perhatian yang tinggi kepada petani dan pelaku usaha sawit supaya apa yang kita himpun bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sawit.

Kemudian mengenai pungutan yang di pungut. Ini di dapatkan pada hasil keputusan di komite pengarah yang terdiri dari 8 Menteri. Diketahui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Anggotanya ada Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala Bappenas, dan yang lain. Dan ini juga menerapkan threshold yang tinggi pada saat

harga CPO di atas \$ 570 per ton. Jadi di bawah itu tidak dipungut karena kita anggap bahwa itu nanti pada saat harganya rendah nanti akan berimbas pada pendapatan masyarakat petani sawit. Sehingga di atas 570 sudah memenuhi, sudah dianggap layak untuk dipungut. Dan rencananya adalah dikumpulkan dalam BLU ini.

Selain itu juga kita selalu memperhatikan situasinya di dalam keputusan komite pengarah. Pada saat harga cenderung turun atau disingkat threshold, apa yang akan terjadi kalau itu petani sawit kondisinya masih belum memungkinkan untuk dipungut? Sehingga untuk tahun 2019 ini Pemerintah meng 0 kan tarifnya. Jadi 2 kali. Pertama di bulan Maret tahun 2019, kemudian di bulan November kemarin sehingga, apakah dia di atas threshold atau di bawah threshold saat ini tidak dikenakan pungutan itu sampai dengan akhir tahun.

Jadi ini resikonya memang target penerimaan yang sekitar 11 triliun menjadi tidak tercapai sama sekali, artinya 0. Tapi saat ini dana di BLU BPDPKS masih sekitar 18 triliun sehingga bisa dipakai untuk operasi tahun depan.

**F-PKS (drh. SLAMET):**

Sebentar Pimpinan, intrupsi.

Kurvanya ada gak? Soalnya kita gak ada kurvanya.

**DIRJEN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN (Dr. ANDIN HADIYANTO, S.E., M.A.):**

Kalau enggak nanti 2 lembar bisa kita *share* Pak. Ini hanya untuk pengantar. Nanti penjelasan lebih detil oleh Bapak Dono Boestami Pak.

Kemudian, itu yang kira-kira kami sampaikan dari keberpihakan. Nah penyaluran dana ini sebagaimana nanti dijelaskan lebih detil oleh BLU BPDPKS ada 6 yaitu:

1. pengembangan sumber daya manusia;
2. penelitian dan pengembangan;
3. promosi perkebunan;
4. Peremajaan perkebunan;
5. Sarana dan prasarana dan;
6. Insentif yudisial.

Ada 6 kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BLU ini. yang nanti utamanya saat ini adalah kegiatan untuk peremajaan kelapa sawit. Artinya salah satu daripada kegiatan yang 6 itu yang menjadi kegiatan utama di BLU BPDPKS.

Demikian Bapak/Ibu sekalian yang menjadi pengantar kami. Kami mohon izin untuk Pak Dono Boestami bisa menjelaskan.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Silakan Pak Dirut.

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (DONO BOESTAMI):**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV dan seluruh Anggota Komisi IV.**

Perkenalkan nama saya Dono Boestami selaku Direktur Utama BPDPKS. Hadir pula di sini lengkap. Kami ada 5 direksi yang hadir juga untuk di rapat hari ini. Perkenankan kami menyampaikan sekaligus juga memperkenalkan apa sih BPDPKS ini. Mohon *slide* berikutnya.

Visi kami menjadi Badan Pengelola Dana yang terpercaya dalam pengembangan sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Misinya, menjalankan kebijakan Pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna secara profesional dan *accountable* untuk kepentingan: 1. Pengembangan sumber daya manusia, 2. Untuk penelitian dan pengembangan, 3. Untuk promosi, 4. Untuk peremajaan, 5. Sarana dan prasarana, 6. Pemenuhan kebutuhan pangan, 7. Hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, dan 8. Penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Kata kunci di sini “menjalankan kebijakan Pemerintah”.

Berikutnya, ini sudah disampaikan saya rasa dasar hukum kami. Mungkin yang agak unik BPDP Kelapa Sawit ini dari BLU yang lain kami ada komite pengarah diketuai oleh Menko Perekonomian. Anggotanya terdiri dari: Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dengan Dewan Pengawasnya: wakil dari Kemenko Perekonomian. Ini eselon I nya Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian ESDM, yang terakhir Kementerian Keuangan.

Mungkin ada Anggota Dewan Pengawas kami yang sekarang juga sudah menjadi Anggota Komisi IV. Pak Panggah, itu dulu mewakili Kementerian Perindustrian. *Assalamualaikum*, Pak. Jadi beliau bisa menjadi narasumber kami harapkan di Komisi IV. Beliau dari awal menjadi Anggota Dewan Pengawas.

Tugasnya berikutnya, tugasnya sebenarnya *simple* Pak. Kami penghimpunan dana dan mengelolanya dan menyalurkannya. Tentu dampaknya di sini yang yang kami salurkan itu adalah program-program Pemerintah disini. Kalau di komisi ini kami membantu mendukung program-

program Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tentu ada lagi, nanti kami juga mendukung Kementerian ESDM intinya ada di sebagai anggota komite pengarah kami.

Berikutnya, ke depannya seperti apa? Ke depannya ada 3 rencana strategis kami, jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Yang pertama, ini sudah berjalan. Konsolidasi data luas lahan dan produksi sawit. Karena hingga hari ini belum ada angka yang jelas. Dari Pemerintah berapa, luas kebun sawit Indonesia dan berapa produksi CPO nasional kita. Kedua, percepatan penyerapan sawit domestik di.

**KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Izin Pimpinan.

Pak Direktur, saya juga bingung kalau tadi Bapak saja mengatakan tidak ada data yang valid mengenai luasan produksi. Ini gimana mengelola negara seperti ini? kalau kita lihat datanya berapa luasan, tidak valid. Hasil produksi, tidak valid. Ini gimana? Siapa yang mau disalahkan kalau hal ini. kalau dalam Pertanian c.q. Dirjen Perkebunan pasti mengatakan, ada angkanya sekian. Tapi kalau kita telisik lagi ke belakang, datanya dari mana? Belum yang ilegal Pak. Ini baru Bapak yang katakan legal, belum yang ilegal. Jadi nanti kita juga minta keterangan dari Saudara Dirjen Perkebunan supaya kita tahu semua di beberapa wilayah, bagaimana dan apa?

Terima kasih. Lanjutkan Pak.

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (DONO BOESTAMI):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang kedua. Percepatan penyerapan sawit domestik ini untuk mengejar produksi CPO sawit kita agar bisa harga tetap terjaga. Yang ketiga, ini jangka pendek. Perluasan pasar ekspor. Ini bukan hanya pasar-pasar tradisional tapi kami juga terus mengembangkan kepada pasar-pasar yang non tradisional. Untuk jangka pendek, kami perbaikan dukungan untuk petani sawit rakyat melalui peningkatan ketepatan sasaran. Ini kami juga sudah melakukan kajian-kajian.

Berikutnya dukungan rantai pasok petani sawit rakyat untuk peningkatan daya saing. Ini juga sudah kami selesaikan kajiannya. Yang terakhir ini untuk jangka menengah. Penyediaan layanan informasi kepada petani sawit rakyat. Tadi di singgung masalah salah satunya saja ada masalah harga TBS. Harga TBS ini sebagaimana kita ketahui bersama, ada sudah Peraturan Menteri Pertaniannya. Di masing-masing wilayah itu ada indeks dan lain sebagainya. Ini yang sedang kita upayakan agar petani ini bisa mempunyai satu referensi harga sesuai peraturan tersebut.

Kami rencananya akan membuat ini sistem digital. Bisa diakses, tidak perlu dengan *smartphone* tapi dengan hp biasa. Ini akan kami kembangkan agar petani rakyat ini tahu harga referensi TBS nya Pak. Yang terakhir memperkuat industri hilir. Ini jangka panjang. Program konversi sawit menjadi *bio hydrocarbon fuel*. Ini sudah berjalan. Target Pemerintah untuk *green fuel* itu dimajukan dari 2023 menjadi 2022. Yang nanti di depan mata akan segera diluncurkan oleh Pemerintah, Program Mandatory B30 yang rencananya dimulai 1 Januari 2020. Berikutnya akhir tahun itu akan menjadi *mix CPO* nya kandungannya menjadi 50%. Itu yang bisa kami sampaikan.

Untuk selanjutnya mungkin saya longkap saja karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen juga. Kita mungkin ke halaman 19, mohon izin. Jadi ini kaitannya dengan program peremajaan sawit rakyat. Jadi BPDPKS ini menyalurkan dana peremajaan sawit ke petani ini melalui program yang di desain oleh Kementerian Pertanian. Jadi ini biar kita pahami semua. Program ini adalah program Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan. Jadi bukan BPDP Sawit.

Kami ikut dalam kebijakan dan kewenangannya. Administrasi penyalurannya agar tepat sasaran kepada petani sawit. Jadi ini yang kami jalankan. Berikutnya, *slide* berikutnya. Ini yang tadi sudah disampaikan juga Pak Dirjen, prosesnya sudah kita persingkat. Itu ada 5 tahapan. Mulai penentuan luas lahan yang diremajakan. Itu di Direktorat Jenderal Perkebunan. Di Dinas Perkebunan kabupaten yang melakukan proses verifikasi administrasi dan di lapangan. Berikutnya proses verifikasi tim integrasi. Baru lah muncul rekomendasi teknis. Jadi dana yang kami salurkan itu atas dasar rekomendasi teknis yang sudah lengkap Pak.

Jadi dengan itu kami sudah membangun satu sistem bersama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan menggunakan aplikasi PSR *online*. Jadi program peremajaan kelapa sawit ini terbuka untuk seluruh petani sawit Indonesia yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi itu.

Berikutnya ini mungkin *slide* berikutnya. Total dana. Terakhir kami punya itu yang sudah disalurkan mulai dari 216 itu 2,341 triliun dengan luas lahan kurang lebih ini 93.702 hektar. Itu tersebar di 21 provinsi dengan jumlah rekomendasi teknis yang kami terima, itu total 452. Berikutnya ini gambaran penerapan aplikasi PSR mungkin sebagai penutup strategi percepatan pencairan dana program peremajaan sawit rakyat.

Kami ada beberapa usulan yang sedang tahap berdiskusi saat ini. Yang pertama, kami mengusulkan untuk menggunakan Lembaga survey. Jadi selain verifikasi yang dilakukan oleh Ditjenbun beserta jajarannya di daerah untuk mempercepat dipandang perlu melibatkan survey independen dalam melakukan pendampingan terhadap kebun yang tergabung dalam kelembagaan perkebun untuk dapat memenuhi kerangka teknis yang telah ditetapkan. Jadi dengan adanya Lembaga survey ini, mereka lah yang

membantu untuk mencari pekebun-pekebun sawit rakyat yang *qualified*, yang sesuai, yang lulus sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan.

Berikutnya, ini gambaran saja tugas dan fungsi *surveyor* antara lain: aktif mencari pekebun. Jadi mereka yang aktif, kita membantu dinas-dinas di daerah untuk mencari pekebun-pekebun yang *qualified*. Berikutnya penyaluran dana PSR tanpa menunggu dana pendamping. Karena sebagaimana kita ketahui, data hibah yang diberikan oleh BPDP itu tidak cukup untuk meremajakan pekebun sawit. Jadi yang kami salurkan itu maksimum Rp 25 juta per hektar, maksimum per kepala keluarga itu 4 hektar.

Berikutnya kami juga mengusulkan penyederhanaan proses verifikasi. Jadi setelah dilakukan oleh Lembaga *surveyor* yang mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh Ditjenbun itu sudah dianggap layak untuk diterima dan tentunya penggunaan aplikasi *online* selama dia bisa masuk sistem *online* itu sudah layak untuk dibiayai.

Yang terakhir, kemitraan. Dalam pelaksanaan program PSR perlu menyertakan perusahaan sawit BUMN atau swasta yang berpotensi untuk mendukung pekebun baik secara obtaker maupun secara avalist. Jadi dalam skema inti plasma, selama plasmanya ini *qualified* sesuai kriteria, harusnya dia juga bisa ikut dalam program ini.

Demikian paparan singkat dari kami.  
Terima kasih.

#### **KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Izin Pimpinan.

Saudara Direktur tadi belum menjelaskan dana yang sekian itu kemana saja penyalurannya? Selain disalurkan untuk petani sawit. Karena kan dananya cukup besar. Yang saya dapat info bahwa itu dipakai untuk pengembangan bio diesel dan diserahkan kepada swasta. Saya gak paham masalah itu benar atau tidak.

Yang kedua, Dirjen Perkebunan selama ini tidak pernah mengatakan kepada kami selama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit ini ada tidak pernah bicara bahwa yang mengurus itu Dirjen Perkebunan. Kami semua asumsinya bahwa Badan Pengelolaan Dana Sawit ini yang mengurus semuanya.

Yang ketiga, kemarin kami mampir PT PN, tidak ada satupun plasma PT PN dari 1 sampai 14 yang dapat dana perkebunan kelapa sawit ini. Jadi nanti tolong dijelaskan dana yang sekian itu kemana saja? Karena kalau kita lihat nampaknya *simple* sekali tadi untuk mengajukan. Sebetulnya Bapak-Bapak di depan ini gak perlu pakai *surveyor*. Kami ini dari 34 provinsi, pasti ada sebagian besar punya perkebunan. Tinggal dicari informasi, serahkan ke siapa, selanjutnya kan yang menilai yang memutuskan. Ini yang di depan ini

Iho. Kami saja selama ini gak tahu. Seolah-olah informasinya sangat tertutup sekali.

Jadi teman-teman kalau mau tanya sama saya “Pak Ketua, gimana caranya?” Saya sendiri gak tahu. Jadi saya minta tolong dengan hormat. Tolong diberikan, dibuka informasi seluas-luasnya. Tadi masalah dana yang digunakan untuk apa juga, kami harus tahu. Bukan kami ikut campur, tapi kami harus tahu. Karena kalau kita lihat pada saat CPO harganya jatuh, CPO harganya turun. Pasti yang diinjak itu petani kecil itu yang diinjak oleh pengusahanya. Hari ini turun Pak. Atau minggu depan diprediksi turun. Seminggu sebelumnya diinjak. Begitu naik, di diam in. Setelah ribut-ribut baru naik sedikit. Ini lho model pengusaha swasta perkebunan sawit seperti itu. Jadi mementingkan kepentingan pribadi.

Tadi dikatakan juga yang bisa mendapatkan itu adalah salah satunya punya SHM (Surat Hak Milik) kepemilikan tanah atau girik. Nah sekarang ini kan bagaimana terobosan? Kalau di ciptakan juga, dipikirkan juga. Kebun milik rakyat di kawasan hutan. Ini harus dipikirkan juga Pak, dicari jalan keluarnya Pak. Kan kasihan mereka juga mau hidup. Karena Dirjen Perkebunan tahu lah berapa juta perusahaan swasta besar mempunyai kebun ilegal. Kalau selama ini nampaknya kan Pak Dirjen Perkebunan “ya sudahlah biarin saja” padahal di kawasan hutan itu banyak beliau itu dulu Dirjen Kehutanan itu.

Di Kalimantan Tengah saja data yang valid disebutkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah. 850 ribu hektar kebun milik swasta, perusahaan besar ilegal. Belum di Riau, belum di Kalimantan Barat, belum Kalimantan Timur. Jadi tolong yang rakyat punya di kebun-kebun ilegal itu gimana Pak? bantu kami solusinya. Karena kami wakil rakyat, kalau rakyat bertanya minta tolong kami. Kami gak bisa, kami dianggap gak ada gunanya jadi wakil rakyat. Ya Pak ya? Saya kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Terima kasih Pak Dirjen dan Pak Direktur Utama yang telah menyampaikan penjelasan. Selanjutnya kami persilakan kepada segenap anggota untuk menyampaikan saran dan pendapat sebagaimana amanah Pasal 257 Peraturan Tata Tertib DPR RI. Setiap anggota menyampaikan saran dan pendapat maksimal 3 menit. Dan akan bijak manakala kurang dari 3 menit.

Kami persilakan yang pertama Bapak Suhardi Duka. Ini pakar sawit. Oh bukan? Ya silakan. Koral dan sawit.

Kami persilakan Pak Suhardi.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

***Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh***

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Dewan yang terhormat.**

**Yang saya hormati Pak Dirjen dan Direktur Utama BPDPKS.**

Saya kira memang kita harus fokus pengembangan sawit Indonesia karena ini adalah komoditas cukup memberikan kontribusi terhadap perekonomian bangsa kita saat ini baik untuk ekspor maupun untuk yang bergantung hajat hidup orang banyak yaitu di petani sawit. Kita tahu bahwa ada dana yang terkumpul yang cukup besar. Tentunya kita harap bahwa ini adalah dana petani, kembali dimanfaatkan oleh petani.

Saya melihat Pak Dirjen sudah melakukan penyederhanaan terhadap persyaratannya dari 14 menjadi 8 syarat. Dan saya kira juga masih bisa dikecilkan lagi syaratnya supaya lebih mudah. Katakanlah surat keputusan dinas tentang sengketa atas Dinas Pertanian tentang tidak sengketanya lahan. Saya kira itu tidak perlu. Bukan kewenangan dinas pertanian itu untuk menyatakan sengketa atau tidak sengketa. Intinya bahwa dipermudah. Ini yang kita harapkan. Jangan dipersulit.

Yang kedua, ingin saya minta penjelasan adalah dana itu diterima oleh BPDPKS kemudian dikelola, tentu kalau dikelola ada hasil dari pengelolaan itu. Simpan di bank saja ada bunga, apalagi kalau dikelola dengan baik, tepat penyalurannya maka akan mendapatkan hasil. Apalagi kalau sampai dengan 50, 70 triliun. Saya kira ini dana yang cukup besar. Ini yang kita tidak tahu sejauh mana hasil pengelolaan itu? Tadi Pak Ketua menyampaikan apakah dikasih pertanian dan lain sebagainya?

Ini juga barangkali peruntukan dari hasil pengelolaannya juga diberikan kepada petaninya. Minimal kepada anak-anak petani sawit. Katakanlah untuk beasiswa mereka dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh mereka. Tidak usah kita Anggota DPR yang dikasih. Kewenangan penyaluran ada di Pekebunan, BPDP hanya sekedar menerima, mengelola, kemudian menyalurkan. Jadi saya kira BPDPKS ini sudah dari siku. Semuanya ada di Dinas Perkebunan.

Saya kira saya *support*, saya hanya minta itu supaya jelas kemana arah daripada pengelolaan dana sawit ini. Sulawesi Barat saya melihat datanya mendapatkan 3.324 hektar atau 83,119 miliar. Tadi Dirjen Perkebunan mengatakan kita butuh 2,4 juta hektar. Kalau 2,4 juta hektar kita diperemajakan dengan 25 juta per hektar. Kurang lebih 60 triliun yang diperlukan dana. Saya berharap bahwa ini diberikan kepada Plasma (rekaman terpotong).. saya tanya kepada Pak Direktur, berapa gajinya Pak Direktur Utama? Itu kan lagi *trend* gaji ya Pak. Lagi *trend*. Saya yakin melebihi gaji daripada anggota dewan. Tanpa dituntut konstituen.



Yang terakhir sekali saya sampaikan kepada Dirjen, karena *ndak* ada Menteri. Kemarin Bapak Menteri kunjungan di Sulawesi Barat tanpa meminta mitranya untuk bersama-sama berkunjung. Dan kunjungannya juga ini tidak jelas, karena yang menjemput ini bukan gubernur tapi mantan gubernur. Mantan gubernur yang jemput gubernur. Saya kira ada gubernur. Tapi juga juga membagi-bagi 114 miliar bantuan kepada masyarakat. Ya saya syukur karena dapat bantuan 114 miliar masyarakat saya di Sulawesi Barat.

Hanya, karena kunjungannya ini saya melihat bahwa tidak ada manajemen yang baik. Karena dikatakan bahwa tiba-tiba. Kok kunjungan Menteri tiba-tiba? Saya tanya teman-teman di sana, apakah ada bencana alam? Ada (suara tidak jelas), banjir dan lain sebagainya? "*ndak* ada Pak, normal-normal saja". Bisa kunjungan tiba-tiba kalau bencana alam. Tapi kalau normal-normal saja direncanakan dong kunjungannya. Ada manajemen. Kalau ada manajemen yang bagus maka mitranya juga diikuti. Kami diberikan undangan itu jam 5 sore. Sedangkan Pak Menteri berkunjung pakai helikopter jam 6 pagi. Jadi kami tentu tidak bisa mengikuti kunjungan itu yang tiba-tiba seperti itu.

Saya kira kalau kita saling menghargai sebagai mitra, saya minta jangan lagi yang dilakukan seperti ini Pak. Gunakanlah manajemen dengan baik, perencanaan yang bagus, jangan melakukan hal yang tiba-tiba kecuali bencana alam. Saya kira tidak bencana alam saat ini. Ini untuk saling menghargai mitra. Tapi kalau mitranya tidak menghargai, kita juga tidak akan menghargai Bapak. Kalaupun hargai kita kan kita juga hargai Bapak. Masa kita hanya sendiri menghargai. Saya kira itu.

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

*Walaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Selanjutnya Pak Edward.

**F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):**

**Selamat pagi Pimpinan dan para Anggota Komisi IV.  
Bapak Dirjen dan jajarannya.**

Saya mendengar pemaparan yang tadi disampaikan oleh Dirjen. Saya terkaget-kaget ini, targetnya 185 ribu tapi realisasinya hanya 34 ribu. Ini aneh. Saya pikir ini orang ini dibuat target ini dia ada data apa enggak? Tahun yang sama berulang, tahun yang sama berulang. Ini saya kecewa sekali. Saya lihat, wah orang ini tidak punya kompetensi di bidang ini. Nafsu besar, tenaga kurang ini. Jadi coba kita realistis lah.

Satu lagi. Apakah bisa dikembangkan di daerah lain kelapa sawit ini? karena ini merupakan sumber tenaga kerja, menjaring tenaga kerja. Terus

terang saya tidak malu, orang NTT itu ke Malaysia itu kerjanya di kebun kelapa sawit. Nah kita di sini tanam luas-luas, kenapa tidak ciptakan perluasan kebun kelapa sawit di lain provinsi? Di sana banyak tanah, NTT. Tapi kita harus memaklumi apakah bisa kelapa sawit tumbuh di sana. Nah ini perlu diadakan semacam survey atau kajian.

Jadi kita jangan mengharapkan akhirnya pusat-pusat kelapa sawit itu yang tradisional saja. Kita harus mengembangkan. Yang bilang 4.0 atau 4.10 apa itu, coba kita kembangkan di luar daerah. Habis yang satu lagi, peremajaan yang dilakukan selama ini, itu dilihat dari umur sawit atau produktivitasnya? Kalau bisa ya kita harus pelajari secara matang. Jangan sampai umurnya masih produktif, kita sudah peremajaan. Ini kan buang-buang biaya. Memang secara teoritis banyak kajian. Tapi kajian yang betul-betul tepat yang lebih menguntungkan. Itu harus kita perhatikan. Karena ini uang negara, rakyat lagi susah ini.

Dan juga menyangkut yang satu lagi, saya berharap agar ke depan kalau terjadi kunjungan-kunjungan ke daerah ini, ini kejadian tadi Pak Suhardi sudah sampaikan. Di dapil saya juga terjadi. Jadi Menterinya pergi, ngomongnya berapi-api tapi wakil rakyatnya tidak ada. Nanti siapa yang mau kontrol itu program itu? Ini kan pelecehan juga ini. Kita tidak minta uang, tidak minta proyek. Yang penting kali tahu sehingga rakyat itu menghargai kami. Nanati dibilang wakil rakyat terpilih “datang, duduk, diam, dengar, terima kasih. Kami malu.

Jadi cobalah kira sinkronisasi, artinya (suara tidak jelas) pergi. Kalau kami tidak biaya, kami bisa biaya sendiri. Kalau cuma naik pesawat, berapa puluh juta sih? Jadi saya ingin supaya sebagai Lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, kita kerjasama. Jangan sampai besok KPK panggil kami anggota DPR ini. “kamu kerja apa saja? Penyelewengan di sini”. Kami tidak mau itu. Jadi semacam peringatan bahwa kita ini harus bekerjasama. Jangan saling curiga supaya republik ini tahun 45 itu bisa tinggal landas betul-betul. Jangan sampai kita tertinggal di landasan nanti.

Saya terima kasih banyak Pak atas pemaparan ini. Cuma saya masih memiliki tanda tanya yang besar sekali. Kenapa negara ini kaya, sumber daya alam kaya, sumber daya manusia juga kaya, tapi kita utang luar negeri juga banyak. Kaya Indonesia ini sangat kaya. Saya kira saya sudah lebih dari 3 menit.

Terima kasih banyak Pimpinan.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Terima kasih Pak Edward.

Pak dr. Slamet.

**F-PKS (drh. SLAMET):**

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Terima kasih.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IV yang saya hormati.  
Pak Dirjen, Pak Kasdi berserta tim yang hari ini hadir.**

Beberapa hal yang mungkin ingin kita sampaikan. Yang pertama Pak Kasdi, terkait dengan masalah sosialisasi. Ini menjadi penting, paling tidak saya berkaca kepada dapil saya. Ketika kemudian salah satu PT PN, kalau gak salah PT PN VIII akan merubah, sedang proses ini untuk melakukan penanaman kelapa sawit.

Ada penolakan yang luar biasa dari masyarakat sehingga ini isu yang mereka terima bahwa kelapa sawit itu menjadikan sumber air jadi kering dan yang lain-lainnya itu menjadi perhatian bagi rakyat dan masyarakat. Dan memang ini terbukti di tempat lain yang memang ada. Saya dari Dapil Sukabumi Pak, Jawa Barat IV. Walaupun tidak luas tapi ada kelapa sawit di sana. Sehingga ini perlu ada program sosialisasi ke masyarakat sehingga ini tidak terjadi pemblokiran dan lain-lain.

Yang kedua, kepada Lembaga BPDPKS. Saya juga dari PKS Pak tapi beda nampaknya. Jadi melihat tupoksinya ini kan penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan dampak apa yang sudah dilakukan oleh itu? Sehingga dalam fungsi pengawasan saya minta data 3 tahun terakhir. Kalau bisa hari ini luar biasa. Sehingga kita bisa melihat penghimpunannya sudah sampai dimana? pengelolaannya kaya apa? penyalurannya dimana? dan dampak dari kegiatan 3 tahun terakhir itu bisa kita awasi. Jadi mohon kesekretariatan, Pimpinan izin. Saya minta dan saya yakin anggota lain juga perlu data 3 tahun terkahir ke belakang untuk terkait dengan tupoksi ini apa yang sudah didapatkan sehingga kita dalam fungsi pengawasan, tadi kata Pak Bupati, Pak Suhardi bilang "kita tidak minta". Dalam fungsi pengawasan kita akan pertanggungjawabkan kepada konstituen kita. Itu saja Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Pak Muslim.

**F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.

## **Pak Dirjen, Pak Direktur dan dari Dirjen Perbendaharaan.**

Yang pertama Pak Dirjen, kita bersyukur hari ini kan sudah terbuka Pak. Terus terang karena masih baru *real day* nih di Komisi IV. Pertama, saya ingin dapat gambaran menyangkut, ini khusus Pak Direktur ya. Sampai saat ini berapa sih anggaran yang dikelola BPDPKS Pak? Jadi kita punya gambaran. Setahu saya memang sangat besar anggarannya. Jadi supaya kita juga paham betul terkait juga penyaluran maupun sasarannya itu Pak Direktur.

Yang kedua, di sini saya melihat menyaluran dana PSR berdasarkan luas lahan. Saya minta nanti datanya Pak. Misalnya Aceh ada 9.080 hektar Pak dengan angka 226.947 miliar, ini kemana saja Pak? Jadi sehingga pada saat kita turun ke dapil besok kita bisa cek Pak, kenapa? Terus terang Pak di Aceh ini banyak sekali petani-petani ini turun-menurun nih Pak Dirjen. Mereka rata-rata itu *ndak* punya legalitas. Artinya dalam konteks ini saya pikir juga pihak Deptan khususnya Pak Dirjen, mencari solusi. Karena bahkan mereka selama ini gak tahu Pak.

Jadi hari ini saya berharap dengan adanya BPDPKS ini kita harapkan ada kontribusi, ada dampak positif kepada rakyat. Tentu dalam hal ini dibukakan saja Pak sepenuhnya kepada kami. Jadi sehingga kita juga untuk fungsi kontrol maupun ada usulan-usulan masyarakat ini juga bisa kita sampaikan kepada pihak Pemerintah. Kemudian saya melihat juga target dari peremajaan sawit Pak tad dari Pak Dirjen. Di sini Aceh baru sekitar 3.733 di 8 kabupaten/kota Pak. Ini dasarnya apa Pak ketika penentuan-penentuan seperti ini? ini mungkin bisa digambarkan buat kami. Kami minta data juga Pak. Jadi sehingga kita bisa melihat langsung.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan, tadi dari sahabat saya menyangkut sosialisasi Pak. Karena menurut saya, sosialisasi ini sangat penting. Kalau di sini saya melihat data yang ada hari ini, itu yang mengajukan dari program peremajaan yang menggunakan dana PKS di tahun 2017 saja rata-rata hanya 1 proposal Pak yang masuk ke setiap provinsi. Yang besar hanya Sumatera Selatan Pak, ada sekitar 13 proposal. Artinya apa? Ini sangat rendah dalam konteks akses dana PKS in kepada masyarakat.

Tentu dalam hal ini saya berharap Pak Direktur ya, saya lihat dengan paparan Bapak ini sudah sangat bagus saya lihat di sini. Tapi yang terpenting sosialiasi seperti apa? Ini sebenarnya sangat diharapkan. Hari ini terus terang Pak, yang begini begini gak muncul di masyarakat. Bahkan saya pribadi juga baru hari ini tahu Pak. Ini mudah-mudahan langkah yang positif hari ini bisa juga sebagai fungsi kontrol kepada masyarakat untuk mendorong supaya mereka juga mendapatkan bantuan-bantuan ini daripada Pemerintah.

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

*Walaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Selanjutnya Pak Panggah. Ini selaku pengawas dalam pembukaan Dewan Pengawas Pak. Silakan.

**F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

**Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan mitra dari Dirjen Perkebunan, Dirjen Perbendaharaan, Dirut BPDPKS.**

Betul memang dulu saya pernah ditugaskan sebagai pengawas di BPDPKS. Tapi memang juga selama saya melaksanakan tugas memang ada beberapa hal yang saya kira saya juga belum jelas sebagai dewan pengawas. Nah sekarang saya masih tetap sebagai pengawas. Tentu saja masih sah untuk bertanya di sini.

Jadi memang dasar dari pembentukan BPDPKS ini adalah Undang-Undang Perkebunan yaitu Undang-Undang Nomor 39 2014 sehingga memang, katakanlah tuntutan atau keinginan untuk dana perhimpunan ini diprioritaskan untuk pembenahan dari kebun-kebun sawit terutama adalah kebun-kebun sawit yang dikelola oleh petani-petani kecil, itu wajar saja. Namun demikian memang keinginan itu boleh saja. Faktanya memang sumber dayanya memang tidak mendukung menurut saya.

Dari target yang ada, katakanlah 5 juta hektar kemudian ditargetkan 2,5 hektar untuk diremajakan itu terlihat dari awal memang kelihatannya memang tidak ada kesiapan untuk bagaimana pelaksanaan peremajaan ini akan dilaksanakan dengan dana yang ada. Dan itu memang terbukti. Kalau kita lihat memang realisasinya itu sangat rendah sekali Pak Dirjen.

Jadi memang di 2017 bisa mencapai 70% tapi itu karena dari target yang sangat rendah sekali yaitu 20.780 hektar. Selanjutnya begitu ditingkatkan target itu, maka realisasinya masih sangat menjadi sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa kesiapan dari Dirjen Perkebunan sebagai Lembaga pelaksana ini masih belum siap Pak. Mohon nanti dijelaskan ini kedepan ini seperti apa dengan target yang ada. Apakah masih akan targetnya seperti itu? Karena kasihan Pak Dirut kalau nanti Bapak tidak siap harus dipertanggungjawabkan itu, uang itu, dana itu. Sehingga harus betul-betul itu disiapkan dengan sungguh-sungguh.

Sebagai contoh soal data. Ini dulu Pak. Data ini tolong dibenahi karena sebenarnya yang paling lebih agak relatif mudah adalah mendata soal produksi. Produksi CPO ya. Jadi ini menjadi kewenangan Kementerian Pertanian karena dulu sebenarnya kewenangannya Kementerian

Perindustrian. Tapi berdasarkan PP 17 kan diserahkan ke Kementerian Pertanian dan kemudian diangkat menjadi Undang-Undang Perkebunan. Jadi ini sekarang menjadi betul-betul tanggung jawab dari Kementerian Pertanian. Bagaimana data produksi CPO itu.

Kalau di Malaysia sudah sangat rapi ini, pendataan ini. Karena tangki-tangki timbunnya itu teregister semuanya. Ini sebenarnya kan relatif mudah nih. Bagaimana meregister tangki-tangki CPO. Mohon ini, karena bukan lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian. Ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Saya kira ini harus menjadi target. Pertama Pak, dananya ada itu dari Pak Dirut kan? Tinggal mendata.

Sekarang sudah ada teknologi yang lebih mudah untuk bagaiman *real time* ya. Dari data *stop* produksi dan juga pemasaran. Ini sampai sekarang belum bisa dilaksanakan padahal itu target yang paling mudah. Apalagi tentu saja data-data kepemilikan lahan itu. Itu akan jauh lebih rumit tapi itu juga harus dikerjakan. Jadi 2 itu dulu sebelum yang lain-lain. Keinginan dan cita-cita itu diinginkan gitu ya dari target 2,5 juta hektar dan lain sebagainya.

Kemudian yang berikutnya tentu saja perbaikan kesejahteraan petani. Ini juga tolong bisa digambarkan Pak, karena persoalan *replanting* selalu menghadapi persoalan pendapatan petani. Pada saat pelaksanaan *replanting* tentu saja ini akan ada kekosongan dari pendapatan petani. Nah ini seperti apa? Akan dibantu, katakanlah BPDPKS ini ya dan Dirjen Perkebunan mengaturnya.

Kemudian saya ingin sekali lagi selain tadi kesiapan data dan lain-lain. Kesiapan sumber daya SDM Pak di Dirjen Perkebunan itu seperti apa untuk bisa mendukung target-target yang diinginkan. Tentu saja tadi bisa saja *outsourcing* ya. Dalam hal ini mungkin pendataan lewat Surveyor Indonesia dan lain-lain. Tapi mohon kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira kesiapan SDM seperti apa. Saya kira itu Pak, jadi beberapa catatan dari saya mengenai pendataan. Yang kedua bagaimana memikirkan kesejahteraan petani selama proses *replanting*, dan juga mengenai sumber daya yang ada di Dirjen Perkebunan sebagai satu-satunya Lembaga pelaksana di dalam pelaksanaan di keseluruhan program ini. Saya kira itu ya dari saya Pak.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Selanjutnya Pak Darori.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

## **Pak Ketua, teman-teman anggota, Pak Dirjen.**

Setelah saya mendengar ekspos dari Pak Dirjen. Saya akan memberikan masukan Pak Dirjen. Bahwa realisasi yang ditargetkan 185 ribu itu kecil sekali hanya 20%. Mungkin Bapak pernah mendengar program TORA ya. TORA itu sampai hari ini sudah hampir 3 juta hektar yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR. Jadi saran saya mestinya ke depan ini Kementerian Pertanian, ATR, Kehutanan cobalah duduk bersama. Karena tanah itu sudah diberikan kepada rakyat sertifikat di sekitar kawasan hutan. Dan anehnya itu hanya dikasih sertifikat, tidak ada program kegiatan tanam-menanam. Yang akhirnya bisa terjadi sertifikat ini dikumpul, dijual kepada orang tertentu. Tolong ini ditangkap. Ini pengalaman saya Pak Dirjen. Tahun 83 saya Kepala Dinas Kabupaten Tapanuli Selatan. Itu orang transmigrasi dari kampung saya, Kebumen, itu pulang areal transmigrasinya dijual. Saya yang beli akhirnya. Dia pulang untuk beli sapi, sewa sawah gitu.

Makanya kalau ini sertifikat, bisa terjadi lagi. Makanya saya sering katakan, jangan mengulangi kesalahan yang pernah saya lakukan. Ini dilakukan lagi oleh Pemerintah sekarang. Tolong Bapak ingatkan Pak Menteri, Pak ini ada tanah jutaan hektar sudah sertifikat tanpa anggaran. Kalau ini dibiarkan, saya yakin pelan atau cepat akan dijual. Jadi program Pak Jokowi itu dibawahnya gak nyambung itu.

Ini tolong Pak Dirjen, saya memberikan masukan. Tolonglah ini ditindaklanjuti. Mau ditanam apa? Karena hampir 30 juta masyarakat kita sekitar kawasan hutan itu miskin, tidak punya modal ya. Kalau Pak Dirjen mengundang kalau mungkin sementara secara teknis antar lintas eselon I Bapak undang ya. Kalau perlu kepala dinas provinsinya diundang. Kita bicara ini, mau diapakan tanah ini? itu yang pertama.

Tadi Pak Sudin, Pak Ketua bicara kebun ilegal. Ini tolong juga hasil investigasi tim yang kebetulan saya waktu itu ketuanya, ada KPK, Kejaksaan, Kepolisian itu di seluruh Provinsi Kalimantan tambah Riau, Sumut, Jambi, sama Sulawesi Tenggara itu ada 8 juta kebun ilegal. Dan 20-30% sudah produksi. Tapi sampai sekarang tidak ada izinnya. Jadi ini jadi ATM oleh oknum. Paling gampang, PBB gak bayar, dipungut pribadi. Ini bahkan Pak Dirjen mengatakan hampir 800 ribu hektar DD Kementerian Kehutanan sudah diputihkan. Itu mutihkannya bagaimana?

Kalau Undang-Undang 18 tahun 2013 mengatakan "Korporasi yang merusak hutan, izin kebun tanpa ilegal itu dikenakan pidana seumur hidup dan denda 1 triliun kok hanya diputihkan? Ini melanggar Undang-Undang gitu loh. Tolong ini disampaikan, urusan kebun ini ya. Tolong aktiflah ya. Jangan pelan atau lambat dipanggil. Gubernur Sulawesi Tenggara 12 tahun, Bupati Kaltim harus 10 tahun, Kalsel 8 tahun. Semua ini Gubernur, Riau dan sebagainya apa mau pelan-pelan akan dimasukkan semua sih? Saya kira gak begitu lah. Kalau begini terus akan masuk semua ini yang berbuat bersalah waktu itu. Karena data sudah lengkap di KPK gitu ya.

Jadi saya kira KPK ini menunggu, apa langkah Pemerintah untuk menyelesaikan ini? dan kita Komisi IV ingin mendorong, membantu, menyelesaikan. Pak Ketua tadi mengatakan, mari duduk bersama, selesaikan secara aturan hukum. Yang mana yang bisa rakyatnya senang, kebunnya senang, Pemerintah nya senang, DPR nya senang. Itu bisa kalau kita duduk bersama, gitu. Demikian Ketua.

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Krisantus.

**F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):**

Ya, terima kasih.

**Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV.  
Teman-teman Komisi IV, Pak Dirjen dari Kementerian Pertanian.**

*Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata.*

*Ndak usah diulang-ulang Pak. Sudah hafal lah Komisi IV.*

Jadi sawit ini memang komoditi yang primadona. Jadi kalau waktu pemilu Pak Dirjen, kami di sana itu ada buah sawit kayu ara. Ada duit ada suara, katanya. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, prospek peremajaan sawit rakyat. Tadi disampaikan di Kalimantan ada 34.775 hektar. Kemudian terbuka untuk seluruh petani di Republik Indonesia ini. Kemudian juga untuk korporasi itu baik BUMN maupun swasta.

Nah yang menjadi pertanyaan 34.775 itu kalau di Kalimantan, kemana saja itu Pak? Seperti ditegaskan Pak Ketua tadi. Kemana saja? Karena kami juga tidak tahu. Yang saya tahu kemarin rapat RDP dengan PTP seluruh petani DPTP, PT PN Nusantara I sampai XIV belum mendapatkan dana *replanting* ini. Kemudian kendalanya ini mesti ada campur tangan Pemerintah saya pikir. Karena apa? Di Kalimantan Barat seperti yang disampaikan oleh Pak Darori tadi, terindikasi ada 2 juta lebih hektar perkebunan ilegal.

Besok akan ada demo di DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Petani sawit demo. Ini terbalik situasi. Biasanya petani yang berhutang kepada perusahaan, ini perusahaan yang berhutang kepada petani. Ada 41 miliar hutang perusahaan kepada petani. Sudah 3 tahun perusahaan itu tidak bayar buah tapi produksi jalan terus. Ini pasti ada campur tangan Pemerintah terhadap korporasi-korporasi seperti ini. Bagaimana mau *replanting* Pak, bagaimana *replanting* mau lancar kalau



korporasi-korporasi yang di bawah naungan Kementerian Pertanian seperti ini? Jadi bukan mensejahterakan.

Jadi di Kalimantan Barat pada hari ini sudah terjadi gejolak PT Surya Borneo Indah (SBI), PT Surya Desa Kapuas, itu terletak di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. 3 tahun tidak bayar buah petani tapi produksi jalan terus dengan berbagai alasan. Bagaimana mau *replanting* kita ini? kemudian PT PN di sana, asetnya 2 triliun, utangnya juga 2 triliun. Bagaimana mau *replanting* di sana? Saya pikir tidak akan jalan kalau tidak ada kebijakan khusus dari Pemerintah bagaimana memperbaiki persoalan di perkebunan kelapa sawit baik itu BUMN maupun perkebunan swasta. Jadi pertanyaan saya itu saja Pak. Kemana saja 34.775 hektar itu?

Saya pikir demikian, Pimpinan. Ini bijak kayaknya tidak sampai 3 menit. *Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata.*  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Terima kasih Pak Krisantus yang telah menjadi pemimpin yang bijak. Pak Bambang Purwanto.

**F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan dan wakil-wakil Pimpinan dan Pak Dirjen.  
Teman-teman anggota.**

Program ini memang cukup bagus. Dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat ini sehingga perlu dikawal dengan ketat sehingga akan memperoleh hasil yang optimal. Sehingga asas kemanfaatannya untuk petani ini juga baik. Namun kami melihat di sini bahwa pengumpulan dana ini seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Badan, bahwa terkendala dengan luas lahan. Juga berapa sebenarnya produksi CPO yang ada? Ini tentu akan terkait dengan pengumpulan dana.

Oleh karena itu kita juga harus, Komisi IV tentunya harus lebih cermat untuk melihat konteks seperti ini. Itulah maka kemarin saya minta untuk dibentuk Panja biar kita bisa tahu persis sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat. Ini luas lahan saja tidak tahu. Kemarin makanya saya minta peta. Pimpinan, supaya nanti ditindaklanjuti.

Kemudian program ini memang cukup bagus tetapi sampai saat ini 3 tahun terakhir realisasinya hanya 30,3%. Artinya? Ini banyak masalah. Seperti yang disampaikan oleh Kalimantan Barat tadi bahwa regulasinya supaya syaratnya supaya diturunkan. Sesuai aspirasi masyarakat yang saya tangkap,

bahwa penetap luas satu hamparan itu, itu luasnya harus 50 hektar. Kalau ini bekas plasma, mudah mereka mengumpulkan luasan 50 hektar. Tetapi ketika ini petani swadaya. Ini agak kesulitan.

Harapan kami supaya target satu hamparan diturunkan menjadi 25 hektar. Soal teknis pembukaan lahannya dengan alat berat kalau diperhitungkan tidak efisien, tapi saya kira teman-teman petani ini sudah punya solusi tersendiri. Sehingga bantuan 25 juta itu bisa dinikmati oleh mereka.

Kemudian yang nomor 2. Ini juga sarana dan prasarana supaya juga segera diberikan terutama terkait dengan jalan kebun. Sehingga mereka lebih efisien dalam mengeluarkan hasilnya.

Yang ketiga, ini terkait dengan masyarakat setempat. Mereka sulit menangkap program ini karena lahannya ini berada pada HPK dan HP sehingga tidak bisa mengambil dana yang 25 juta ini. Kalau terjadi seperti ini tentu ini akan terjadi benturan horizontal. Apalagi yang pendatang bisa memanfaatkan ini, sementara masyarakat setempat justru tidak bisa. Ini sangat rawan di daerah. Jadi ini saya minta dari perkebunan ini supaya diantisipasi persoalan-persoalan seperti ini. Karena program ini bagus tetapi ketika justru akan muncul masalah baru di lapangan, ini juga jadi persoalan tersendiri.

Kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang mengeluh karena pada saat sekarang ini, mereka sudah investasi besar-besaran tetapi sebagian lahannya masih masuk HP, HPK. Ini tentu perlu solusi dari Komisi IV karena ini lintas Kementerian/Lembaga. Kalau Kementerian Pertanian saya kira tidak mampu. Oleh karena itu segera dibentuk Panja, Pimpinan. Sehingga kita tahu persis karena kalau nantinya ini muncul di permukaan, terus ditanya apa langkah-langkah Komisi IV? Kita tidak bisa memberikan solusi.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

*Walaikumsalam.*

Satu menit setengah. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Pak Sulaeman Hamzah. Papua tapi tidak keriting.

**F-NasDem (H. SULAEMAN L. HAMZAH):**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

**Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati.  
Pak Dirjen, Pak Dirut dan Dirjen Perbendaharaan.  
Seluruh hadirin yang saya hormati.**

Terutama saya melihat dari penjelasan tadi. Penjelasan Pak Dirjen dan Pak Dirut tadi masih banyak yang harus disempurnakan. Pak Dirut tadi bilang bahwa data luas saja belum jelas. Sementara dari Pak Dirjen menyampaikan bahwa luas lahan dengan target sekian dan realisasi semuanya ada termasuk di dalamnya penyampaian tadi. Barangkali ini kita di Komisi IV, Pak Pimpinan. Bolehkan nanti validasi data ini kita ditargetkan waktu kapan untuk bisa, data ini bisa kita pegang jadi satu data. Data yang dipegang Pak Dirjen dan juga data yang dipegang oleh Dirut tadi. Sehingga kita tidak lagi menggunakan data yang asal-asalan gitu.

Yang berikut mengenai kebun rakyat ini. kebun sawit rakyat ini banyak yang juga menimbulkan masalah karena ternyata bahwa penerapan harga TBS di kebun rakyat yang tidak langsung di bawah perusahaan nampaknya ini ada perbedaan harga yang memang perlu ada penyerapan lebih tegas lagi dari Pak Dirjen karena ini masyarakat justru dikorbankan. Padahal Pemerintah sedang giat-giatnya untuk mendorong masyarakat supaya lebih memanfaatkan lahannya itu lebih maksimal.

Nah ini tolong bisa dipastikan sehingga kewajiban perusahaan untuk menampung sawit rakyat yang ada di sekitar situ, itu menjadi suatu keharusan karena kalau tidak ini kasihan. Ada yang sudah tidak mau panen lagi karena memang harganya terlalu jauh di bawah. Berbeda dengan harga yang diterapkan di perusahaan yang menggunakan sistem borong. Itu ternyata bahwa memang ada selisih harga yang cukup besar yang terus terang ini merugikan masyarakat. Itu soal harga tadi.

Dan soal berikut tentang penerapan hal-hal yang terkait dengan ketentuan umum dalam rangka pengelolaan dana tadi. Ini mungkin bisa lebih terbuka lagi dan disosialisasikan secara luas. Karena ternyata bahwa tidak semua masyarakat mengetahui adanya dana seperti ini. mereka hanya tahu ada dana KUR di bank. Takut persoalan ke bank pun mereka sama sekali tidak memahami.

Yang terakhir data di perkebunan kita Pak Dirjen dan Pak Dirut, mungkin ini dalam rangka pemungutan pengumpulan dana sebesar-besarnya. Ada di tempat saya di Papua itu PTP II itu bermasalah sudah lama. Bermasalah sudah sekian tahun, pabriknya rusak, karyawannya tidak dibayar, akhirnya sekarang panen pun tidak dilakukan. Dan ada upaya untuk ini mau dialihfungsikan atau dialihkan perkebunannya itu ke swasta atau ke Badan Usaha Desa, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di daerah.

Nah ini tolong bisa ini dikawal juga karena ini meninggalkan utang dan masalah yang cukup banyak. Tidak hanya dengan karyawan tetapi juga dengan masyarakat setempat yang lahannya itu bermasalah. Dulu PTP masuk dengan iming-iming dengan masyarakat, lahannya disertifikatkan,

sertifikatnya dipegang oleh perusahaan, perusahaan gadaikan ke bank, dan kemudian muter di sekitar itu saja. Ini masalah yang barangkali tidak ada kaitan langsung, tapi Pak Dirjen ini barangkali bisa disiasati. Sekali lagi yang tadi, untuk data tadi minta penegasan dari Pimpinan. Sebulan atau kapan bisa kita diberikan data di Komisi IV ini.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

*Walaikumsalam.*

Mba Riezky April.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Sebelumnya saya ingin menyampaikan, ini langsung dari dapil saya. Jadi pertama, saya ingin membahas terkait Kabupaten Musi Rawas Utara. Ini saya baru dapat, tadi malam kabar. Saya minta kita berdiskusi nanti Pak permasalahan ini. Terkait masalah kebun Plasma. Bahwa ada lahan plasma yang di klaim 240 hektar hari ini tetapi menurut Pemkab, ini dari tahun 2003 belum diserahkan katanya kepada masyarakat. Menurut Pemkab harus diverifikasi dulu dengan PT Lonsum ya.

Kemarin, minggu lalu. Tim saya yang di situ katanya sudah berkoordinasi dengan Kades Bina Marga SP 5, Kecamatan Karang Dapo terkait plasma tersebut tetapi masih menunggu verifikasi actual dari Pemkab. Ini kan Muratara ini kan memang saya tahu juga. Banyak suku anak dalam di situ. Dan berapa kali terjadi permasalahan di daerah sini. Cuma harapan saya, saya mohon kejelasannya supaya kan sebentar lagi kami harus reses. Saya ini turun ke wilayah ini nanti Pak. Paling tidak saya yang bisa saya sampaikan kepada mereka. SP 5, namanya di situ bukan Desa, jadi SP SP-an. Jadi SP 5, Kecamatananya Karang Dato, gitu.

Daerah transmigran. Banyak di situ memang hamparan sawit, banyak sekali memang Pak. Kemudian saya sepakatlah bahwa memang Muba sebagai bahan percontohan. Ini juga lagi-lagi aspirasi yang harus saya sampaikan Pak. Bahwa banyaknya kebun-kebun yang berada di kawasan hutan sehingga mempersulit program revitalisasi atau *replanting* dikaitkan dengan legalitas lahan yang tidak jelas atau sertifikat yang tidak dikeluarkan oleh BPN. Padahal kalau dipikir-pikir kadang kebun-kebun tersebut bagian dari program sama, transmigrasi juga kan ya. Terkait wilayah itu.

Transmigran yang menaruh juga negara yang di wilayah itu. Jadi ini kaitannya juga di Muba, di wilayah itu. Karena kebetulan mungkin Bapak-

Bapak dengan Pak Beni, Pak Wabup Musi Banyuasin kebetulan kakak saya itu. Ini kan aspirasi dari yang berkaitan langsung Pak Ketua.

Terus banyak juga kebun plasma sawit dari rakyat yang tidak bisa diproses pengajuan ikut program *replanting* di BPDP dan Dirjen Perkebunan gara-gara tanahnya bermasalah karena masuk kawasan hutan tapi mengingat tadi penjelasannya datanya juga gak ada, ya saya maklum juga. Tapi besok-besok kalau bisa dibenarin Pak. Jadi bingung juga kita jelasinnya kan gitu. Terus kemudian kebijakan (suara tidak jelas) ini kaitannya dengan, kebijakan memang mungkin terkait TORA tadi yang dijelaskan Pak Darori sampaikan. Memang sebagai solusi sudah tepat tapi pelaksanaan dan eksekusi di lapangannya ini yang sulit.

Nah jadi kembali lagi terkait sawit ini kalau saya pribadi sebenarnya saya menolak tanaman sawit ini untuk ada lagi, apalah, misalkan mau diperluas di Sumatera. Karena saya dengan mata kepala saya sendiri Pak, keluar masuk hutan sawit di SP SP itu, disebelahnya got saja itu bisa kering itu tanaman. Dan juga masyarakat di sana cenderung miskin Pak, di sekitar situ. Jadi saya harap memang juga ini kan ada BPDPKS ya. Saya harap juga kalau memang dimungkinkan ada alokasi untuk yang dananya ini untuk kebutuhan fasilitas umumnya juga tolong dibantu lah Pak. Sinyal telepon saja gak ada di situ.

Jadi saya lihat juga syaratnya, mau bank. Boro-boro ke bank, mereka beli motor saja, habis terima duit nih misalkan jauh-jauh, besok motornya hilang. Jadi gak sepadan juga gitu lho. Ini dari mereka sendiri. Rata-rata itu saya dengar dari Kabupaten Musi Rawas karena kan sebagian beririsan antara Musi Rawas dengan Musi Rawas Utara. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan Pak. Dan saya harap juga karena Sumatera Selatan ini adalah kedua terbesar setelah Riau tadi saya lihat. Saya mohon datanya juga sesegera mungkin untuk bisa kita diskusikan karena ini terkait dengan kami harus menjawab konsituen.

Saya harap juga Bapak-Bapak, pelatihan Pak. Karena yang namanya, maaf ya Pak, namanya orang di kampung. Sekolah saja kalau memang mereka pintar, mereka pasti jadi dokter, jadi insinyur. Gak mungkin jadi petani sawit, kan begitu, gitu loh. Jadi mohon ada pelatihannya Pak. Karena mereka sampai pernah bilang ke saya, "kita pokoknya di kasih ya kita tanam". Ya mau bagaimana bentukannya mereka yang penting mau hasilnya jelek atau gimana yang penting mereka terima duit. Akhirnya gak ngerti gitu lho, maksudnya saya.

Jadi tolong ada pelatihannya, dan sekali lagi karena di situ juga banyak ya kira harus buka, transaksional juga kadang-kadang urusan-urusan bibit lah, urusan apa dan segala macam, ini saya..

(rekaman terpotong) Baik, dari Pemerintah dan masyarakat gak ada istilah kaya begitu, gitu lho maksud saya gitu. Jangan sampai mereka menjadi sapi perah para oknum-oknum yang ada di sana.

Sekian dari saya.

*Wabillahitaufig walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Ibu Endang.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):**

Pimpinan izin, kalau saya intrupsi sedikit Bu Endang.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):**

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu terima kasih.

Maaf, saya potong sedikit. Karena tadi sudah beberapa kali kita bicara data, data, dan data. Pak, kita sebelum dilanjutkan boleh gak kita menyamakan data sebentar Pak ya. Saya tertarik soalnya. Pak Dirut BPDPKS, ini menurut presentasi Bapak dari tahun 2016 sampai 2019, pengeluaran dana PSR berdasarkan luas lahan itu 97.702 hektar dengan total dana 2.341 triliun. Apakah betul? Saya mohon Bapak langsung jawab.

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (DONO BOESTAMI):**

Ini data yang terakhir kami punya di sini Pak. Luas lahan itu dari 2016 sampai 2019 itu 93.702 hektar. Total dananya itu 2.341.021.361.260.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):**

Jadi di presentasi Bapak, ini salah Pak ya? Ini bukan 97 ribu, melainkan 93 ribu?

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (DONO BOESTAMI):**

Ya, kami itu pakai data yang ini yang terakhir Pak.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):**

Maaf, oke. Berarti ini saya coret Pak ya? Ini 93 ribu. Pak, boleh Bapak sebutkan tahun 2019 menurut data Bapak berapa hektar?

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (DONO BOESTAMI):**

Di sini kami ada 77.913.075 hektar.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):**

77 ribu Pak? Saya gak akan lanjutkan Pak. Ini kita daritadi bicara data. Ini ada diskrepansi data dari Dirjen Kementan dengan Pak Dirut. Ini berbeda. Tahun 2019 ini menurut data Pak Dirjen 2019 itu yang terealisasi 2 ribu hektar. Menurut Pak Dirut ini 77 ribu hektar. Ini kita bicara data, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini yang benar yang mana?

saya cuma ingin menanyakan menurut Pak Dirut tahun 2016 berarti berapa transfer dana maupun realisasi program Bapak tahun 2016? Mohon dijawab.

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (DONO BOESTAMI):**

Di 2016 itu hanya ada satu. Itu 254 hektar dananya 6.350.000.000. Data per Desember ini, per 10 Desember 2019 Pak.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):**

Baik, jadi Bapak-Bapak sekali lagi, nanti tolong dijelaskan ya. Kita daritadi bicara data ini, ini langsung di depan mata saja Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya ini ada 2 presentasi yang harusnya ini kan selaras nih. Ini Pak Dirjen, Pak Dirjen ini sumbernya Kemantan sama BPDPKS lho. Yang satu menyebutkan tahun 2019 ini 2 ribu hektar realisasinya. Transfer dananya 1,3 triliun. Pak Dirut bilang tahun 2019 menurut data Pak Dirut itu 77 ribu hektar.

Saya belum mau menyentuh angka realisasi transfer dananya ini, saya lebih seram lagi ini. Tolong Pak Dirut, saya ingin tahu total dana yang telah diterima oleh BPDPKS selama program ini berjalan totalnya berapa? Daritadi kia belum mendapatkan presentasi. Setelah itu silakan pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Mau dijawab sekarang atau nanti Pak? Sekarang?

**KETUA KOMISI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan, saran saya dijawab sekarang supaya kita bisa rapat berkelanjutannya lebih tahu lagi.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Silakan.

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (DONO BOESTAMI):**

Mohon izin saya mesti tahu bulat angkanya satu-satu.

**KETUA RAPAT/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Pak Dirjen mau komentar?

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc):**

Izin.

**KETUA RAPAT/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Silakan.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):**

Terima kasih.

Tadi ada satu *feedback* dari Pak Budi. Pak Budi mohon maaf karena ini soal sinkronisasi data terakhirnya, Bapak. Karena proses rekomtek dengan transfer, itu ada *delay*. Nah kami sudah menyebutkan dan itu sudah masuk di dalam *online*. Kami mohon maaf ini belum kami, data kami masih tanggal 23 Oktober karena memang belum valid di datanya, di *online* nya ini. kalau belum di *online* nya BPDPKS. Tapi nanti ada seperti konsiliasi data kami berdua untuk bisa mensinkonkan bahwa datanya akan sama dengan beliau. Karena yang di transfer itu biasanya masih lebih rendah dari rekomtek kami.

Pak Budi tadi menyampaikan 52 itu adalah yang sudah di transfer oleh BPDPKS. Kalau kami sebenarnya kewenangannya ada di rekomtek. Jadi realisasi rekomteknya 68 ribu Pak Budi. Nah mohon izin betulin ini nanti setelah valid duanya, kami akan *update* lagi Pak ini. Ini baru 23 Oktober, *insyaallah* datanya akan sama karena memang kalau tidak valid beliau tidak akan transfer kepada yang mengusulkan PS itu.



Jadi sekali lagi, betul sekali ini aplikasi yang kami ambil Pak Budi, pada 23 Oktober. Yang beliau ini sudah Desember tadi. Ini nanti yang kami susulkan adalah yang tambahan yang sudah valid menurut *online* nya BPDPKS. Itu nanti akan ketemu Pak. Mesti sama ini, *insyaallah*.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):**

Baik, jadi Bapak ini seharusnya berdasarkan rekomtek Pak ya? Oke. Tapi butuh tolong diingat tadi Pak Dirut mengatakan tahun 2019 di 77 hektar. Jadi saya gak tahu, kalau itu rekomteknya itu masih ada selisih yang cukup besar menurut saya.

Terima kasih Pak Dirjen.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Sudah selesai Pak Dirut? Belum? Atau dilanjut dulu Bu Endang. Pertanyaan ke Dirjen atau ke Pak Dirut? Buat 3? Ya, ambil yang Dirjen dulu.

**F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWAI THOHARI, DESS., M.Sc.):**

Baik, terima kasih Pak Ketua dan teman-teman sejawat.  
*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

**Pak Dirjen dan Pak Dirut yang saya hormati.**

Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Budi tentang validasi data. Jadi tidak saya ungkapkan lagi. Cuma yang saya ingin klaifikasi karena kebetulan sekali *replanting* ini kan hubungannya dengan peremajaan pohon-pohon yang sudah tua. Padahal kita ini *problem stunting* Pak. Yang mustinya bisa kita olah dari pohon-pohon yang sudah tua tadi, dari sawit yang tua tadi untuk dikelola dengan baik. Apalagi di bawah Badan Litbang Pertanian ini, banyak sekali balai-balai penelitian yang sudah mulai merancang atau menghasilkan penelitian-penelitian untuk peningkatan gizi masyarakat karena *problem* dari stunting ini sudah cukup besar 30%. Hampir di semua dapil kebanyakan kekurangan gizi anak-anak.

Ini mohon dari dana yang sudah terkumpul 47,18 triliun ini, diarahkan sebagian ke balai-balai penelitian. Dan juga ada penelitian yang sudah berhasil. Malah di masyarakat Pak, itu tentang dari nira sawit. Namun kenyataannya di lapangan itu belum disosialisasikan dan dikemas dengan baik. Padahal ini merupakan tujuan kita bahwa mengumpulkan dana-dana dari hasil ekspor itu untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Ini yang terjadi ketimpangan-ketimpangan di masyarakat.

Jadi saya setuju dengan pendapat Bapak-Bapak tadi bahwa kita semua ini perlu mengawal tentang keberadaan dana-dana itu dan berapa alokasinya untuk pengembangan SDM tadi? Dan mestinya ada *benchmark*

analisis bahwa sebelum ada dana dan sesudah ada dana yang dikucurkan ke masyarakat itu bagaimana hasilnya? Karena kita menyadari bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar '45 Pasal 33, semuanya kan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah ini belum pernah ada yang menganalisa hal ini.

Kemudian yang kedua Pak. Saa mewakili kaum perempuan nih Pak. Ternyata upah buruh perempuan di sektor sawit itu tidak sama diberikan kepada laki-laki. Nah ini mohon ada perhatian Pak. Karena perempuan itu kalau bekerja kan meninggalkan keluarganya lebih berat Pak. Jadi anak-anak tadi yang dikemukakan Bu Kiki tidak bisa diawasi dengan baik karena harus bekerja.

Kemudian inovasi-inovasi teknologi apa saja yang sudah didapatkan dan sudah dilakukan dengan tadi, dana yang sekitar 47,18 triliun tadi. Ini sangat penting Pak karena kita ini kan sudah banyak permasalahan di masyarakat yang perlu diantaskan kemiskinannya oleh teman-teman semua. Baik itu dari Birokrat, baik dari DPR, maupun dari masyarakat setempat.

Nah kemudian banyak juga *problem* tentang *agroforestry* Pak. Jadi kawasan sawit ini kan banyak yang dilakukan di hutan-hutan. Saya ingin menanyakan kepada 2, Pak Dirjen dan juga Pak Dirut. Impikasi apa dan bagaimana cara mengatasinya? Karena banyak sekali konflik sosial Pak di situ. Padahal kita kan sudah tadi yang dikemukakan Pak Darori, ingin sekali bahwa sosial itu tidak terjadi di masyarakat. Jadi mohon dijelaskan perkembangan terkini implementasi konsep dari kebijakannya untuk keberlanjutan dari sawit kita di Indonesia yang sekarang ini kan sedang disorot oleh dunia internasional. Jadi mestinya kita harus arif dalam menangani *problem-problem* sosial di arena sawit.

Kemudian ini Pak tentang riset inisiatif. Jadi dalam mekanisme riset ini, bagaimana peranan dari Pak Dirjen, koordinasinya dengan LIPI ataupun Menristek. Karena saya dengar banyak sekali teman-teman saya peneliti, yang merasa ada kekurangharmonisan. Nah ini mohon diperhatikan karena hasil-hasil penelitian dari mereka itu cukup banyak yang bisa dikembangkan di masyarakat terutama di dapil-dapil kita yang notabene banyak sekali kebun sawitnya.

Dan yang ketiga Pak, ini yang terakhir ini Pak. Mohon tadi yang diungkapkan teman-teman bahwa pada waktu pelaksanaan, kami mestinya diundang untuk ikut mengawal dan pengawasi Pak. Karena Bapak-Bapak Dirjen ini kan jarang di lokasi. Kalau kami tiap hari ada di dapil. Sehingga keluhan-keluhan masyarakat itu selalu diserahkan atau diungkapkan kepada kami semua. Tadi Pak Ketua juga menyatakan bahwa sering-sering anggota dewan ini tidak bisa menjelaskan dengan baik karena tidak adanya transparansi informasi yang jelas dari para pemangku jabatan. Hanya itu, demikian.

Terima kasih.

*Wabillahitaufig walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Teuku Khalid.

**F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**Pak Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi IV yang saya muliakan.  
Pak Dirjenbun, Pak Dirjen, dan Pak Direktur BPDPKS yang saya hormati.**

Awalnya muncul pertanyaan saya di ruang ini menyangkut dengan dana BPDPKS adalah hasil laporan petani sawit dan juga dari pihak PTP. Maka waktu itu, waktu kami RDP dengan PTP. Kami mempertanyakan tentang dana BPDPKS yang waktu itu laporan yang saya dapat sekitar 1 triliun. Ternyata informasi yang kami dapatkan disampaikan dalam ruang ini juga minggu yang lalu waktu kami RDP dengan Perkebunan bahwa sekitar 20 T. Dan permasalahan yang mereka sampaikan dan masyarakat sampaikan kepada kami bahwa rumitnya pengurusan untuk mendapatkan BPDPKS ini Pak.

Maka semalam saya mendapatkan bahan ini dari Bapak, bahwa ada perubahan simplifikasinya tentang persyaratan untuk mendapatkan BPDPKS. Saya ingin tahu, kapan ini dirubah? Sejak kapan persyaratan ini berubah? Ini perlu kami tahu, sejak kapan perubahan ini berubah?

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
(DONO BOESTAMI):**

2019 ini Pak.

**F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):**

2019? Oke. Karena kemarin Pak, masih laporan ke kita sangat rumit Pak. Jadi jangankan masyarakat biasa, PTP saja rumit. Sedangkan *replanting* atau peremajaan sawit sangat dibutuhkan, sedangkan dana mengendap. Ini yang sangat naif Pak. Kemudian setelah perubahan ini terjadi kami baca, bahwa ada persyaratan di poin nomor 5 dimana syaratnya dalah STDP (Surat Tanda Daftar Budidaya). Ini sesuai dengan penegasan daripada Ditjenbun sendiri. Itu surat 105 Keputusan/P 400 kalau tidak salah, tahun 2018 terhadap penegasan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Persayarat STDB ini Pak. Bahwa 25 hektar di bawah dikeluarkan oleh Bupati, betul? Sedangkan 25 ke atas dikeluarkan oleh Kementerian, benar?

Maka oleh karenanya saya juga menyarankan pada kesempatan ini. kalau bisa Pak dalam satu usulan minimal jangan 50 hektar. Juga disesuaikan 25 hektar, saran saya Pak. Agar lebih mudah karena apa? Karena Permen 21 menegaskan bahwa lahan yang 25 hektar ke bawah itu bupati daerah, 25 ke atas itu Kementerian. Saya pikir ini kita bagaimana mencari porsi mempermudah Pak. Tetapi bukan berarti kita menampilkan regulasi-regulasi yang ada. Karena permasalahan sampai 20 triliun anggaran ini terpendam akibat regulasi yang berbelit-belit, persyaratan yang begitu panjang.

Kemudian saya pikir kalau ini sudah ada, SK Bupati tidak perlu lagi Pak. Karena itu juga bagian daripada dasar di atas. Tapi pada prinsipnya, saya ingin menyarankan kepada Bapak. Pertama, bagaimana mencari regulasi atau formasi yang lebih ringan agar anggaran yang terpendam ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pengembangan sawit selanjutnya.

Kemudian sebagaimana disarankan oleh Pimpinan tadi, agar dana BPDPKS ini tidak hanya bisa digunakan untuk peremajaan, tetapi mungkin dan diharuskan juga digunakan untuk penanaman sawit baru. Apakah itu hutan sosial dan lain sebagainya. Saya pikir ini Pak Ketua.

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih Teuku.

Nona Yessy, silakan.

**F-NasDem (YESSY MELANIA, S.E.):**

Baik, terima kasih Pimpinan

**Pak Dirjen beserta jajaran yang saya hormati.**

Pertama, kita harus jujur Pak Dirjen. Saya ini adalah orang baru, orang yang baru di DPR, orang yang baru di Komisi IV yang mengurus pertanian, perkebunan, dan segala macam dengan kompleksitas masalah yang luar biasa tinggi. Dan saya juga berasal dari Dapil Kalimantan Barat yang notabene juga permasalahan perkebunan terutama kelapa sawit ini sangat sangat tinggi dan saya rasa harus menjadi catatan, harus menjadi catatan kita bersama.

Dan tadi saya mendengarkan betul penjelasan, pemaparan dari Pak Dirjen bersama jajaran. Tanda tanya saya hanya satu Pak Dirjen, kenapa

sampai sebegitu rendahnya realisasi dari target yang sudah ditentukan untuk PSR ini. itu pertama, dan apasih sebenarnya yang membuat sampai 2019 ini saja per Oktober kalau gak salah baru 30an persen ya Pak? Jadi belum sampai 50%. Ini menjadi hal yang sangat serius karena berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan dengan petani-petani sawit kita.

Sebetulnya mereka sangat menginginkan program ini karena program ini sangat baik tetapi kenapa tidak tersentuh, tidak tersampaikan dengan baik juga di masyarakat kita. Apakah hal ini karena alasannya persyaratan yang panjang, kemudian prosedur yang lumayan rumit bagi mereka. Ya dinilai dari Kementan mungkin. Dan apakah ini memang karena data yang dari tadi menjadi polemik, menjadi bahasan kita bersama. Gimana kita mau mengobati, kalau kita mengidentifikasi, kita memberikan status ini penyakitnya apa, bagaimana kita mau mengobatinya itu?

Dan kemudian walaupun memang alasannya karena syarat dan prosedur yang berbelit dan panjang, saya sangat mengapresiasi dari Kementerian sudah memangkas, sudah membuat lebih mudah persyaratan dan prosedur yang disyaratkan untuk petani-petani sawit ini bisa mengajukan dan bisa mengakses dana *replanting* ini. Tapi kalau memang alasannya adalah data, ini bagi saya hal yang konyol.

Saya sedikit bercerita Pak Dirjen, kemarin memang sempat kami RDP dengan PT PN khususnya ke Dirut PT PN XIII. Saya juga menyampaikan untuk mendapatkan perhatian khusus, perhatian lebih di Kalimantan Barat. Pertama, kabupatennya adalah Kabupaten Melawi Pak. Jadi di sana memang sudah banyak lahan sawit yang nganggur, yang sudah tua, sudah tidak produktif lagi, dan bahkan cenderung statusnya terbengkalai.

Sekarang sudah bukan lagi masalah itu yang kita bicarakan, tetapi tadi Kementan mengatakan untuk akan *me-replanting*, merevitalisasi, dan segala macam. Tetapi yang terjadi di sana adalah masalah sosial sekarang Pak. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat kita dimana lahan yang sebenarnya masih punya PT PN dan masih hak milik juga, hak guna masih punya perusahaan. Tetapi secara kondisi aktual di lapangan, itu sudah dipakai oleh masyarakat. Sudah digunakan oleh masyarakat, dialihkan, ada yang sudah membuat rumah, ada yang sudah membuat tanaman-tanaman lain. Jadi bukan lagi sawit.

Nah ini *boro-boro* mau *me-replanting*, *boro-boro* mau revitalisasi kebun itu nanti yang ada ketika datang lagi ke sana PT PN itu menimbulkan konflik baru. Jadi, dan kemarin saya sudah mendapat titipan dari ketua adat salah satu kecamatan di dapil saya. Ketika PT PN datang ke sana, mereka kan ribut, mereka akan demo. Nah ini yang saya tidak mau. Saya penginnya menjadi penengah antara Pemerintah dan masyarakat. Karena itu lah tugas kami Pak Dirjen.

Kemudian berbicara data, saya sangat setuju itu harus menjadi prioritas kita dan catatan kita. Inginnya saya, semoga saja nanti bisa

disiapkan oleh Pak Dirjen dan kawan-kawan di Kementan, sebelum reses ini saya menginginkan ada data yang valid khususnya di Kalimantan Barat. Karena saya melihat di sini tadi ada 8 kabupaten/kota penyebaran untuk program PSR ini, dan saya ingin tahu di kabupaten mana saja, yang mana saja yang sudah terealisasi dan yang akan dilakukan untuk tahun 2020. Karena ketikan saya reses, menjadi bekal saya untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, Pak Dirjen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Selamat siang.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Bapak H. Sutrisno

**F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Pak Pimpinan.

**Pak Dirjen Perkebunan, Pak Dirjen Perbendaharaan, Direktur BPDPKS.**

Mencermati apa yang Bapak sampaikan apa yang tertulis bahwa Pemerintah mempunyai keinginan untuk menjadikan sawit ini sebagai prioritas strategis nasional dan tugas ini dibebankan kepada BPDPKS. Dari sisi saya sebagai wakil rakyat, ini adalah janji Pemerintah kepada rakyat. Untuk merealisasikan janji itu, makanya Lembaga ini dikawal hampir oleh semua Kementerian termasuk Menko nya di bidang perekonomian. Perencanaan termasuk juga BPN dan para profesional juga diawasi. Mudah-mudahan bukan pakai-pakai honor ini.

Oleh karena itu, karena ini adalah Rapat Kerja terbuka, menjadi keharusan ya Bapak-Bapak ini terutama BPDPKS untuk secara terbuka menyampaikan tugas tanggung jawabnya kan menghimpun dana dari iuran sawit. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola dana, tugas dan tanggung jawabnya dalam menyalurkan. Mestinya kami dikasih tahu, tidak usah berdebat satu sama lain mana datanya. Bagaimana mungkin kami mengetahui apa yang Bapak telah kerjakan dan apa yang Bapak hasilkan. Kemudian apa yang dihasilkan? Dampaknya seperti apa?

Oleh karena itu memperkuat Pak Muslim dari Dapil Sukabumi, Pak Muslim juga dari Dapil PKS untuk secara lengkap bahwa BPDPKS menyampaikan kepada kami, publik, berapa dana yang dihimpun, berapa yang dikelola, berapa yang disalurkan, dan apa yang dihasilkan. Kemudian dari hasil Rapat Kerja dengan PT PN I sampai dengan XIV. Mohon maaf Pak Dirjen Perkebunan, kami menyoroti Bapak sebagai operator, operator keberhasilan programnya. Kemudian ujung tombak yang Bapak bisa gunakan untuk mencapai hasil serta operasional secara proposional adalah PT PN I sampai dengan XIV.

Dari Rapat Kerja kemarin ke 14 nya menyatakan terjadi penurunan aktivitas. Bahkan dari 14 itu, 6 mengalami kerugian, 3 harus pastinya sudah di likuidasi. XIV, XIII, dengan I yang di Aceh seharusnya di likuidasi karena equity nya sudah defisit. Sudah 0, sudah tidak punya uang lagi. Sudah tidak punya modal lagi, gak bisa bayar utang. Dikasih duit berapapun pasti untuk memenuhi kebutuhan rutinitas. Kalau tidak likuidasi ya di merger lah, jangan dibiarkan. Jadi menjadikan seharusnya menjadi hal yang akhirnya rakyat Pak Dirjen, secara berbondong-bondong ikut berbisnis di bidang ini.

Menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah bagaimana mengawal rakyat ini supaya usahanya selamat, usahanya juga berhasil. Karena tujuan daripada Badan ini adalah bagaimana mengendalikan harga, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, bagaimana menumbuhkembangkan industri sawit ini. Tapi sebagaimana disampaikan oleh para Direktur Utama PT PN, kegagalan usaha itu karena terjadi penurunan harga.

Bapak Dirjen Perkebunan tadi menjelaskan bahwa penurunan harga itu sebagai akibat dari pengelolaan sawit, daripada dampak lingkungan. Mestinya ini tidak perlu terjadi karena ada Lembaga khusus untuk mengembalikan harga. Berbagai macam persoalan harus segera terproteksi sebelum itu terjadi. Nah oleh karena itu saya menyarankan nih Pak Dirjen, tugas Pak Dirjen bagaimana memberdayakan PTP sebagai ujung tombak Bapak, bagaimana memberdayakan usaha kelapa sawit rakyat juga sebagai tugas tanggung jawab Pemerintah.

Dana yang dihimpun lewat iuran sawit itu bukan hanya semata-mata untuk meremajakan, bagaimana petani sawit bisa diarahkan, mampu mengelola hasil produksinya. Karena hanya dengan jalan itu kesejahteraan rakyat petani sawit akan bisa dicapai.

Kemudian yang kedua, peremajaan sawit yang tadi Bapak sampaikan. Dari 18 ribu hektar yang ditargetkan tahun 2018 hanya mencapai 33 ribu. Kemudian Bapak juga merencanakan 2019 menjadi 180 ribu hanya tercapai 68 ribu. 2020 sampai 2032 rata-rata tiap tahunnya 180 ribu. Darimana ini Bapak merencanakan? Kok sangat jauh dari realisasi yang dicapai? Oleh karena itu jelaskan kepada kami apakah mungkin karena rakyat tidak paham? Rakyat tidak tahu? Sehingga tidak memanfaatkan sumber-sumber dana itu. Secara terbuka, persoalannya apa? Apakah karena regulasinya yang memang harus dirubah? Atau kebijakan-kebijakan lain yang harus dilakukan lewat anggota dewan ini?

Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan jadi perhatian Pak Dirjen karena terus terang saja informasi yang terima dari Kementerian Pertanian, justru sektor sawit ini pendulang devisa setelah migas. Jadi kalau saya tidak setuju kalau dihapuskan. Terus ditumbuhkembangkan, Mohon maaf terlupakan Pak, saya dari Dapil Jawa Barat IX. Kemarin Pak Dirjen menyebutkan bahwa pulau Jawa sebagian 2 ribu hektar. Kemarin Pak Dirjen PT PN VIII, yang lain agak kurang semangat mengembangkan sawit, justru Dirjen PT PN VIII ingin mengembangkan sawit di Jawa Barat. Artinya apa? Ini

peluang untuk ditingkatkan, bukan hanya 2 ribu. Bisa diberikan target yang lebih.

Terima kasih Pak Dirjen.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Pak Haerudin.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan, anggota yang terhormat.  
Pak Dirjen beserta seluruh yang hadir.  
Bapak Direktur dan yang lain juga hadir.**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Pertama, Pak Pimpinan ingin kami sampaikan tapi mohon langsung jawabannya. Bapak-Bapak apa kalau sawit kita itu merugi atau menguntungkan hari ini? kesimpulan Bapak? Mohon jawabannya Pak Pimpinan, langsung.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc):**

Baik, terima kasih Pak Haerudin.

Secara umum kalau mau mencermati sekarang ada perbaikan? Ada ya. Dari segi perhitungan analisis usaha tani, itu menguntungkan. Nah nanti kalau ada permasalahan-permasalahan tadi, banyak sekali *feedback* itu, itu subjek bagi kami untuk perbaikan dan seterusnya. Ya, menguntungkan.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Ya, terima kasih.

Pimpinan, ingin kami sampaikan bahwa kalau sawit kita menguntungkan kenapa kita tidak mengembangkan? Kenapa kita punya keluasan yang menurun? Ini belum bicara petani plasma kita ini, ke sawit plasmanya. Ini baru kita yang ada di lingkaran kita terutama yang di manajemen oleh Kementerian ataupun Badan-Badan yang diberikan tugas oleh negara.

Ingin kami sampaikan bahwa kalau petani kita menjerit urusan harga, sementara Bapak menjawab bahwa kita menguntungkan sawit itu. Tetapi petani menjerit masalah harganya, mana yang tidak bersamungan sebenarnya? Apakah ini karena bandarnya banyak? Tanda petik yang sering



disebut oleh kita ada kartelisasi yang susah diurai oleh Kementerian, oleh Pemerintah. Atau ada yang lebih satu tingkat lagi lebih ekstrim bahwa sindikasinya justru terjadi bagaimana meraup keuntungan sebesar-besarnya dari sawit dan tidak tahu urusan kerugian yang diterima oleh rakyat.

Kalau dari berita yang kami baca dari setiap kesempatan, rakyat kita itu yang petani kebun sawit, justru mereka menjerit urusan kerugiannya. Saya dari tadi mendengarkan tentang penjelasan. Memang ada hal yang belum diungkapkan dengan baik oleh baik dari Kementerian ataupun dari Badan yang kita hadiri hari ini. Mungkin ini data-data yang harus diungkap ke permukaan dan harus dijelaskan. Itu bisa menjadi bahan pemikiran dan evaluasi oleh kita semua.

Yang kedua Pimpinan, ingin kami sampaikan bahwa di Jawa Barat itu terutama Jabar Selatan. Pak Bupati tadi sudah sampaikan terutama Jabar Selatan PT PN VIII itu dia punya perkebunan sawit yang luas sekali, dan karet. Dan hari ini hampir hilang, hari ini hampir hilang di Jabar Selatan ini. Tidak ditanami lagi, ada yang kasusnya sengketa lahan yang lahannya dikembalikan kepada rakyat. Ada yang memang tidak ditanami lagi. Apa itu perhitungan yang merugi atau perhitungannya apa. Kalau mendengar dari PT PN VIII, semangat pengembangan sawit di Jawa Barat, salah satunya Jabar Selatan.

Tentu banyak hal yang harus kita evaluasi Pimpinan, dari persoalan sawit ini. Kami mendukung gagasan teman-teman, Pak Budi, terutama yang menyampaikan kita buat Panja tentang sawit ini. Terutama bantuan negara yang begitu besar untuk perkebunan sawit ini dan butuh pertanggungjawaban yang secara baik kepada Pemerintah, kepada rakyat. Tentu kita butuh juga data yang baik. Tidak mungkin hanya rapat kerja atau rapat dengar pendapat. Tapi kita butuh seluas, seluhur-luhurnya, setinggi-tingginya Pansus, serendah-rendahnya Panja.

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Pak Dr. Hermanto. 3 menit Pak

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Kalau saya dikasih waktu 3 menit, yang lain kaga. Gak apa-apa, 3 menit, 5 menit juga gak apa-apa.

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh*

## **Pimpinan yang terhormat, anggota, dan Dirjen dan Direktur Dana Perkebunan Sawit.**

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa perusahaan sawit Indonesia ini punya *problem* dengan negara Uni Eropa. Sebentar lagi akan diadakan persidangan. Nah Indonesia ini menggugat. Ceritanya menggugat ya Pak Dirjen ya? Tentunya kita ingin bertanya ini, persiapan untuk menggugat ini sudah seperti apa? Karena kita ingin target daripada menggugat ini, kita ingin menang. Dan menang itu ditunjukkan dengan masuknya produk CPO kita ke uni eropa. Ini lantaran karena kita di dalam mengelola sawit di Indonesia terdapat beberapa masalah yang terkait utamanya adalah dengan HAM, yang terkait dengan soal penggunaan tenaga, pegawai di bawah umur kerjanya. Jadi yang dipersoalkan.

Kemudian juga terkait dengan *processing*. Yang hubungannya dengan higienis dari proses tersebut. Kemudian juga kalau kita lihat sebelah sana itu, Uni Eropa itu ingin melakukan proteksi pasar di Uni Eropa dengan pengembangan minyak bunga matahari. Saya pikir, saya minta untuk menggugat persidangan di Uni Eropa ini di WTO ini. Tentunya kami minta supaya ini betul-betul dipersiapkan sedemikian rupa baik data, dokumentasi, dan segala macamnya sehingga minyak sawit kita ke Uni Eropa tidak terkendala. Ini juga pasar ya. Kalau kita tidak kelola dengan baik, ini bisa merugikan sawit di Indonesia. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa sawit ini diversifikasi produknya sangat beragam dan banyak. Tidak hanya CPO tapi juga di situ ada turunan-turunannya. Ada sabun, ada kosmetik, ada segala macamnya ini kan. Saya ini setuju dia ada dan dari pihak Pemerintah untuk mengembangkan hilirisasi. Ini kalau ini dioptimalkan saya pikir ini bisa bermanfaat sekali buat petani rakyat.

Ada satu hal yang sampai sekarang itu belum tuntas oleh kita terkait dengan hilirisasi. Itu bio diesel. Sekiranya kita tidak tembus di sidang WTO nanti dan kita gagal masuk ke Eropa, saya pikir teknologi bio diesel kita harus dipersiapkan karena kebutuhan bio diesel ini sangat tinggi di dalam negeri karena memang pangsa pasar kita dan kebutuhannya juga jauh lebih besar dibandingkan di eropa. Ini kalau kita persiapkan, saya pikir ini pun juga baik buat perkembangan saat ini.

Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan satu sisi tadi Pak Dirjen mengatakan kita untung, kemudian juga dampaknya kepada pekebun itu menghasilkan di atas UMR dan ini adalah satu capaian yang cukup bagus menurut saya. Tapi kalau kita mau mendalami secara serius di masyarakat, itu masyarakat pekebun itu selalu mengeluh dengan soal harga dan daya serap. Nah ini perlu juga diatasi bahwa data dan fakta ini perlu disajikan secara objektif saya pikir.

Saya pikir kami di DPR ini bukanlah yang ingin menerima Asal Bapak Senang, gitu. Tapi kita data-data yang faktual dan nyata, itu adalah bagian

dari perencanaan kita dalam hal mengambil kebijakan dan keputusan. Mungkin itu merupakan satu hal yang sangat kita butuhkan. Data-data yang valid.

Sejauh yang saya cermati di lapangan, petani itu selalu mengeluh dengan soal harga. Nah ini kalau misalnya di sini diadakan peremajaan sawit, saya pikir ini satu program kerja yang bagus. Tapi juga di sisi lain, harga juga harus diperbaiki di sisi masyarakatnya supaya masyarakat pun juga semangat untuk menanam dan memelihara sawit ini. Karena di masyarakat itu sering terjadi alih fungsi usaha. Kalau tidak sawit lari ke karet, kalau gak ke karet lari ke produk-produk pertanian yang lain seperti cabai, dan segala macamnya. Nah ini bisa mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan. Saya pikir ini perlu kita pertimbangkan secara matang bahwa terjadinya alihfungsi lahan ini pun juga berakibat kepada produktivitas.

Oleh karena itu lahan-lahan sawit yang tersedia sekarang, menurut saya ini perlu harus di data sedemikian rupa dan petanya jelas. Mana yang milik rakyat dan mana yang milik perkebunan. Karena yang kami ketemui di lapangan itu biasanya para pengusaha, itu lebih cenderung melakukan ekspansi terhadap lahan-lahan kehutanan dan segala macamnya. Dan bahkan juga bukan hak daripada pengusaha itu pun juga di *embat* juga. Nah ini saya pikir perlu ada kebijakan yang tegas terhadap pengusaha-pengusaha yang melakukan hal-hal semacam itu.

Selain dari itu saya minta juga, ini seperti di Kalimantan ya. Kebun sawitnya relatif luas di sana dan masyarakatnya mengeluh. Ini saya sekali lagi mengulangi bahwa kami pernah melakukan kunker ke sana. Itu sawit itu hanya tempat mereka bertanam kemudian hasilnya di bawa ke Pulau Jawa, gitu. Jalan rusak, apa segala macam tidak, dan juga tidak menyerap tenaga kerja di sana. Termasuk di daerah-daerah lain. Saya Dapil Sumatera Barat. Ini juga mohon diperhatikan karena Sumatera Barat itupun juga banyak kebun sawit dan juga banyak hutan yang luas masih segar bugas. Saya pikir ini perlu ada pencegahan terjadinya ekspansi lahan ke lahan-lahan perhutanan. Nah ini menurut saya perlu dipertimbangkan oleh Kementerian.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Sudah cukup Pak

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Kata Pak Ketua baru 5 menit.

Ya, berarti berapa hal yang menurut saya. Begini, satu lagi yang perlu dipertimbangkan bahwa tipologi pasar dari sawit ini pun juga menjadi pertimbangan dari pengambilan keputusan. Karena kalau kita cermati ini kan pasarnya termasuk juga pasar yang disebut persaingan sempurna juga enggak, ya kan? Disebut monopolistik juga enggak. Jadi ini pasarnya, pasar

tidak tidak, gitu. Nah di sini sering terjadi apa yang disebut oleh Pak Kyai Haerudin itu, sering terjadi banyak perantara-perantara, *broker-broker* (rekaman terputus)

**F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):**

(rekaman terputus) Ada dua wilayah yang memang menjadi banyaknya petani di sana. Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Kalau melihat dari keseriusan Pemerintah, saya lihat Pemerintah ini serius ya untuk bisa bagaimana kelapa sawit ini bisa dilakukan peremajaan sawit rakyat ya. Karena regulasinya di sini saya melihat sangat jelas. Dari mulai Undang-Undang sampai Perpres. Berarti tentu kita sebagai DPR nya juga ingin mengawal terhadap keputusan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan peremajaan sawit rakyat.

Hanya saja yang ingin saya tanyakan ya, mungkin ingin juga butuh pemahaman karena memang baru nih terhadap persawitan nasional ini. Dari laporan dari instansi peremajaan tahun 2016-2019, tadi juga sempat ditanyakan oleh Pimpinan dari data juga ini masih belum akurat ya, belum sinkron antara Kementerian, Dirjen Perkebunan serta Direktur tadi. Nah ini juga suatu persoalan.

Yang ingin saya tanyakan, yang pertama dari sisi realisasi ini kan melibatkan 41 ribu pekebun. Pekebun di sini apakah memang pekebun swasta atautkah memang banyak yang dilibatkan dari pekebun rakyat? Karena ini kan akan menentukan bagaimana pengendalian terhadap penyaluran.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Bu, diperjelas. Kebun rakyat, swasta?

**F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):**

Pekebun.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Perusahaan.

**F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):**

Pekebun perusahaan atau perkebunan rakyat biasa. Itu yang ingin saya ketahui terlebih dahulu. Dan kedua, bagaimana sih mengolah aplikasi yang dibuat sistem daring di sini? Saya melihat ada ya aplikasi daring, tapi sulit untuk bisa dibuka. Bagaimana para kebun kita rakyat akan bisa mengakses aplikasi tersebut? Sementara kita saja yang rasional ini sulit untuk mengakses.

Apakah ini semata-mata hanya untuk bisa memenuhi *online* ya, tapi mempermudah akan tetapi ini cukup menyulitkan. Apa menggugurkan kewajiban saja gitu? Hanya pekebun-pekebun yang tingkatan *level-level* yang memang swasta murni yang memiliki modal besar yang hanya bisa mengakses sementara pekebun-pekebun rakyat yang di bawah sana yang memang murni pekerjaannya itu ekonominya dihasilkan dari kebun, sulit gitu untuk mengakses itu.

Nah bagaimana mengelola, mengendalikan itu? Tujuannya bagus saya lihat untuk bisa transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau rakyat saja sulit mengakses, ini mau seperti apa? Berarti target-target realisasi yang akan dicapai ini juga tidak akan tercapai.

Berikutnya yang ingin saya tanyakan dari realisasi peremajaan, ini adanya terjadi peningkatan penyaluran dana sebesar 60,21% pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018. Mohon penjelasan 60,21% dari nilai apa? Nilai angka uang kah? Atau nilai jumlah dari pekebun-pekebun itu sendiri yang diberikan modal.

Saya juga ingin tahu bagaimana pihak Dirjen maupun Dirut melakukan pengendalian optimalisasi terhadap kualitas rekomtek tadi. Tadi dijelaskan bahwa adanya suatu perbedaan angka disebabkan oleh rekomtek yang memang selisih dari jumlah para pekebun tadi sebetulnya seperti apa pengendalian rekomteknya? Apakah memang tadi dari awal mulai dilakukan verifikasi usulan proposal dan lain sebagainya, ini siapa yang mengendalikan? Sehingga tidak ada persoalan dikemudian hari. Ternyata pekebun-pekebun rakyat yang di bawah juga masih kesulitan melihat rekomtek. Alurnya juga seperti apa? Ini yang ingin saya ketahui. Mungkin itu yang yang ingin saya pertajam.

Terima kasih.

*Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

*Walaikumsalam.*

**Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi IV yang saya hormati.**

Pak Ketua ada tambahan? Ini silakan 3 menit juga. Biar bijak.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):**

Terima kasih.

**Pimpinan, segenap anggota, Pak Dirjen dan Pak Dirut.**

Kalau saya baca ya Pak dari tupoksinya itu. Ini dari A sampai H ya dari Badan. Apa yang sudah dilakukan Pak, sebenarnya Pak, selama Badan sudah eksis? Ditengah gempuran begitu besar dunia terhadap sawit. Dan

gempuran ini tidak lepas dari perang dagang nih. Sehingga Indonesia menjadi sangat tidak berdaya. Dan buat saya itu gak di masuk akal itu. Ketidakberdayaan kita.

Kita itu pemasok 70% ya Pak Dir? 70% sawit dunia. Benar kan? Bayangin menguasai 70% sawit dunia tetapi kita tidak mengendalikan harga dan peta sawit dunia. Bodohnya berapa kali tuh kita Indonesia. Yang mengendalikan justru adalah yang tidak menguasai sawit. Satu itu, dari gempuran dunia terhadap kita.

Kedua, dari masalah-masalah dampaknya nih, dari gempuran tersebut masalah-masalah yang dihadapi oleh sawit rakyat di luar urusan penanaman kembali. Belum lagi masalah riset. Karena turunan sawit itu sangat ditakuti dunia Pak. Karena dia adalah jawaban bagi dunia. Saat ini gempuran dunia terhadap sawit kan masalah lingkungan segala macam, tetapi pada saat yang sama, sawit adalah jawaban bagi dunia. Kebutuhan nabati dunia nih, per tahun kan tumbuh Pak. Dari seluruh riset yang ada sekitar 4,5 juta ton nabati per tahun.

Kalau ini terus tumbuh, yang bisa menyelamatkan siapa? Hanya sawit. Karena hanya sawit yang produktif. Mau nabati yang lain? Kedelai? Apa? *Grape seed? Sunflower?* Mau berapa juta lahan yang dibuka baru untuk memenuhi kebutuhan nabati? Di sini ada rasionya. Kita itu, artinya misalkan simpel nya nih. 1 hektar tanah/lahan. Ini contoh saja ya, sawit itu bisa menghasilkan 10 ton nabati misalkan ya, yang lain mau kedelai, mau apa tuh hanya 10% nya dari sawit kok. Sehingga negara-negara eropa, negara-negara maju sebenarnya gak ada pilihan.

Jadi saya berharap Badan ini benar-benar di bawah koordinasi Pemerintah Pusat, Badan ini benar-benar bisa menunjukkan dalam konteks sawit adalah produk unggulan bangsa Indonesia yang harus menjadi kekuatan utama kita di hadapan dunia. Jangan terbalik malah kita dikerjain. Sangat berharap. Apalagi turunan-turunan dari sawit kan gak hanya CPO, banyak sekali itu yang nilai tambahnya bisa membuat Indonesia makmur nanti.

Sama nih Pak Dirjen seperti keratom nih, main larang saja. Indonesia tuh main gampang saja, bodohnya berkali-kali. Keratom dilarang tetapi ujung-ujungnya nanti produk hilirnya yang kita impor. Padahal sumber bahan bakunya di kita. Gak ada penelitian, gak ada apa, main larang. Meskipun kesalahan BNN dalam hal ini. Sementara di Thailand yang dilarang katanya sekarang sudah dibuka. Akhirnya ntar nilai tambahnya ke sana. Terlalu banyak di Indonesia yang bikin kita lucu, akhirnya lama-lama kita terpuruk. 10 tahun, 20 tahun kemudian. Mungkin itu.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

*Walaikumsalam.*  
Terkahir Pak Made.

**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):**

Ya terima kasih Pak Ketua.

**Rekan-rekan Anggota Komisi IV yang saya hormati.  
Bapak Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.  
Badan Pengelolaan Dana Sawit yang saya hormati.**

Saya sebetulnya memberikan apresiasi nih kepada program ini ya tentang peremajaan kelapa sawit ini ya. Jadi yang ada target-targetnya sudah, yang sudah dimulai beberapa tahun yang lalu kemudian juga di tahun 2019 ini. Kalau kita melihat kondisi eksisting kita berdasarkan sekarang ini tentang kelapa sawit, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi tentang sorotan yang begitu tajam uni eropa tentang kelapa sawit kita ini. Baik itu dari sisi deforestasi, kemudian tenaga kerja, ekosistem, kemudian lingkungan kita.

Ini kita harus intropeksi diri untuk belajar. Kemudian juga ya bagaimana caranya yaitu melakukan komunikasi lobi lobi supaya betul-betul kelapa sawit kita ini bisa kompetitif dengan dunia luar. Saya rasa kita harus benar-benar kenalan ini, tentang pengelolaan manajemen daripada kelapa sawit ini. Nah saya ingin bertanya ini, kalau terus gempuran begitu tajam dari uni eropa, apakah kita masih punya prospek gak nanti kelapa sawit kita ini? kalau tidak, kita bisa lakukan pembelaan. Diplomasi tentang ekonomi terutama kelapa sawit ini di dunia internasional, gitu. Masih ada prospek gak itu? Itu yang pertama.

Yang kedua, komposisi kepemilikan lahan kelapa sawit kita pada saat sekarang ini kan hampir sebagian besar dikuasai asing ini. Guthre, misalnya dari Malaysia. Begitu membeli di Riau dengan jutaan hektar. Itu saya ingin tanya sekarang, berapa komposisi tentang pembelian lahan kelapa sawit ini antara asing, kemudian dunia usaha swasta, dan juga milik rakyat. Barangkali ini perlu dilakukan *mapping* kembali tentang kepemilikan lahan ini sehingga tidak sebagian besar seluruhnya dikuasai oleh asing. Berikan ruang yang begitu besar di konteks peremajaan kelapa sawit ini kepada rakyat kita. Kepada rakyat kita pembinaan-pembinaan ini.

Selanjutnya Pemerintah posisinya itu sebagai regulator dan fasilitator. Barangkali perlu juga dibenahi tentang regulasi yang mengatur tentang dunia perkelapa sawit kita. Misalnya tentang Undang-Undang Perkebunan kita pada saat sekarang ini. Perlu dilakukan revitalisasi. Mana yang tidak cocok, mana yang masih bisa berjalan. Contohnya misalnya tentang kemitraan misalnya. Antara perkebun inti dengan plasma misalnya. Kan perlu dibenahi ini. Karena dia adalah motor penggerak di lapangan.

Jadi posisi kebun rakyat ini kan sangat terjepit dia karena aturan regulasi misalnya, karena pemodal besar punya akses yang begitu besar kepada pusat-pusat kekuasaan apalagi diberikan ruang yang begitu besar oleh regulasi ini, terutama di daerah yang sulit dikendalikan.

Dan yang terakhir, sayup-sayup ini saya baca, dengar itu Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit kan dari dulu sudah itu, dari dulu sudah terbentuk ini. kira-kira apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit ini? jadi ini kan baru pertama kali kita lakukan semacam *hearing* dengan Komisi IV ini. Jadi barangkali ini perlu diberikan kepada kita tentang apa yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit ini. Jadi barangkali dari sisi bentuk progres pertanggungjawaban begitu, akuntabilitasnya. Jadi barangkali ini Pak Ketua.

Terima kasih.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):**

Ketua, terakhir Pak Ketua.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Selesai Munas kan? Ya, silakan 2 menit Pak.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.  
Dari dapil ini Pak Ketua, bukan Munas.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Ini sifatnya sebagai masukan bagi kita di Komisi IV. Pak Dirjen Perkebunan ya, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali lahan sawit kita ini, ini bukan sawit yang rakyat ya. Sawit swasta ini yang melanggar Pak. Yang merusak hutan. Memasuki kawasan hutan yang dilindungi. Oleh karena itu kita meminta kepada Dirjen Perkebunan. Pertama Pak, betul-betul hati-hati ya untuk memberikan rekomendasi untuk izin kepada swasta-swasta ini Pak yang memperluas lahannya. Karena ini harus ada kerjasama antara perkebunan dan kehutanan Pak. Karena kami di Komisi IV ini lagi ada Panja juga untuk kehutanan untuk menyelidiki perkebunan sawit yang memasuki kawasan hutan Pak. Itu yang pertama.

Yang kedua mungkin ada data dari Pak Dirjen Perkebunan Pak, perusahaan-perusahaan besar ya, ini bisa menjadi data bagi Komisi IV agar nanti Panja Kehutanan ini bisa lebih detil nanti pekerjaannya. Yang kedua Pak Dirjen Perkebunan, ya kita meminta Pak supaya kelapa sawit rakyat ini Pak ya menjadi fokus karena kalau swasta itu sudah jelas Pak ya, sudah jelas



ada milik swasta dan mereka korporasi. Bagaimana kerjasamanya dengan swasta Pak agar mereka ini tidak dinaikkan secara harga.

Ini ada gak dari Dirjen Perkebunan sistem, sehingga CPO dari sawit rakyat ini betul-betul ada harga HPP terendahnya Pak dari biaya operasionalnya mereka, gitu. Ada gak penjelasan Pak Dirjen Perkebunan karena selama saya di Komisi IV ini sudah masuk tahun ke-6 memang gak pernah secara detil kita membahas mengenai masalah sawit ini Pak ya.

Saya kira Pak Ketua Komisi IV ini sangat bagus sekali, sehingga kita bisa lebih fokus kepada komoditi-komoditi yang menjadi unggulan daripada bangsa kita. Saya kira itu saja ya Pak Ketua.

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Pertanyaan, saran, dan pendapat oleh yang terhormat telah disampaikan dan selanjutnya mohon jawaban dan tanggapan dari 2 Dirjen dan 1 Dirut. Pak Dirut tadi saja dijawab itu setelah saya berikan kepada Pak Dirut tentang pertanyaan berapa besar penyaluran. Dan untuk program peremajaan sawit rakyat 2019. Sekaligus nanti dijawab Pak, rencana kegiatan 2020 agar seluruh yang terhormat ini ikut terlibat pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Sehingga tidak ada pertanyaan saat RDP yang akan datang.

Silakan diawali Pak Dirut dulu. Pertanyaannya kan sederhana, untung apa rugi? Karena Komisi IV ini dengan mitranya semenjak melakukan RDP dari Bulog hingga PT PN banyak ruginya semua. Rugi semua Pak. Semoga ini kesimpulannya untung, kan gitu.

Silakan Pak Dirut dulu.

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (DONO BOESTAMI):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mungkin langsung dari pertanyaan yang tadi, total yang pendapatan dari hasil pungutan dari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2019 itu totalnya ada 47,23 triliun. Yang sudah disalurkan itu totalnya ada 33,603 triliun. Sehingga sisa dana per 31 Oktober itu 1,448 miliar. Itu angkanya terakhir.

Kalau ditanya program 2020, jadi kami dalam hal ini masih menunggu rapat komite pengarah yang rencananya akan dilakukan minggu ini atau minggu depan karena seluruh kebijakan yang akan ditugaskan ke kami itu akan diambil di rapat komite pengarah. Untuk itu kami sedang menunggu jadwal sambil mempersiapkan data-datanya. Tapi kalau kedepannya dalam

waktu dekat ini program yang sudah di depan mata itu adalah *Mandatory* B30. Itu menurut rencana akan diluncurkan sebelum akhir tahun. Tapi programnya sendiri *Mandatory* nya sesuai Peraturan Menteri ESDM nya itu efektif 1 Januari. Jadi akan ditarik beberapa minggu.

Terus kedepannya tentu kalau peremajaan dan lain sebagainya termasuk sarana dan prasaran, kami berkoordinasi atau bekerjasama dengan Pak Dirjen bagaimana untuk 2020 ini bisa terpenuhi. Khusus untuk sarana dan prasarana juga kami masih menunggu rekomendasi teknis yang akan diberikan karena memang BPDP ini agak unik karena kami bukan sebagai regulator. Jadi kami ini adalah salah satu instrumen yang dibentuk oleh Pemerintah khususnya untuk industri sawit. Jadi pemilik program, sekali lagi ini ada di Kementerian. Minimal sebagai anggota Komite Pengawas seperti contoh ke depan ini Bapak Presiden sudah minta akhir tahun ada program B50.

Itu akan melibatkan tentu bukan hanya Kementerian Pertanian tapi mungkin Kementerian Perindustrian nantinya karena *policy-policy* SNI dan lain sebagainya. Ini yang kami dukung Pak. Dan kedepannya kalau kita melihat industri sawit apakah untung atau tidak. Kami masih positif industri sawit kedepannya masih menjanjikan. Hanya memang diperlukan kebijakan-kebijakan yang mungkin kedepannya utamanya industri kelapa sawit ini bukan hanya untuk pangan saja. Tapi mungkin kedepannya sudah mulai dipikirkan untuk menjadi sumber energi.

Ini adalah berkah dari Allah SWT. Kita diberikan sawit begitu besar dan masih bisa terus ditingkatkan khususnya tadi Bapak Pimpinan juga menyampaikan perang dagang dan lain sebagainya. Kalau kita menjadikan ini sumber energi. Teknologinya sudah dikuasai oleh insinyur-insinyur orang Indonesia. Sekarang bagaimana kebijakan, itu yang akan kami dukung program-program Pemerintah. Demikian Pak

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Intrupsi Pak Dirut.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Pak Bupati.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Tadi pertanyaan saya, Bapak kan barang pengelola. Dikelola kemana itu dananya? Yang kedua, Direksi berapa gajinya? Di jawab itu Pak.

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
(DONO BOESTAMI):**

Terus terang kalau saat ini pengelolaan dana, kami baru bergabung di Februari 2017 Pak, kami kedepannya memang ini yang tugas berat kami Pak. Jadi rencananya, kalau namanya saja kan Badan Pengelola Dana. Jadi seharusnya dana ini dikelola bagaimana nanti menjadi dana abadi atau *endowment fund* Pak, kedepannya seperti itu. Ini untuk menutupi program-program Pemerintah. Untuk saat terus terang baru kami tempatkan di 3 bank Pemerintah. Itu BNI, Mandiri, dan BRI Pak, itu saja. Kalau gaji kami, gajinya nanti saja. Berdua saja Pak.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Saya tidak ingin tahu gajinya Bapak. Gajinya nanti saja masing-masing.

**KETUA KOMISI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan.

Saya ingin penjelasan detil. Di sini dana yang sudah dihimpun 47 triliun, yang terpakai 33,6. Kemana saja? Tolong nanti ditampilkan, Sekretariat tolong nanti di catat ya. Jadi jangan habis rapat, lupa. Besok ditanya lagi, saya gak mau. Ditulis. Dari 47 triliun, yang terpakai 33,6 yang sudah untuk *replanting* berapa banyak? Berapa banyak dipakai untuk biaya promosi ke luar negeri?

Berapa banyak yang dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan alasan blablabla. Dan termasuk juga berapa besar gaji direksi dan lainnya. Saya mau tahu secara detil karena setahu saya di Undang-Undang nya tidak ada kata-kata untuk bio diesel. Betul gak Pak Dirjen Perkebunan? Ada gak di Undang-Undang nya? Undang-Undang ini? nanti Bapak cek saja, kalau Bapak gak bisa jawab sekarang, Bapak cek, jawab nanti. Saya minta jawaban dari 47 ini. Kemana saja yang 33,6 sudah keluar? Karena ini adalah hak untuk petani sawit.

Tadi yang dikatakan Pak Daniel, kita di *banned* oleh uni eropa. Lho gampang kok. Ini Kementerian Perdagangan bikin kebijakan. Kita di *banned* sama uni eropa ekspor sawit, Indonesia juga sama nge-*banned* juga. Apa yang di *banned*? Uni eropa tidak boleh masukkan *wine* ke Indonesia serta minuman lainnya. Dampaknya ya seperti itu. Ini kan gak akal sehat. Berapa banyak? Saya tegaskan, berapa puluh riliun ekspor CPO dibandingkan dengan impor *wine*? Aduh *masyallah*. Saya juga bingung gimana Pemerintah ini.

Tolong Saudara Dirut dijelaskan supaya kami ada data karena waktu rapat dengan Dirjen Perkebunan yang lalu lalu, ada juga seperti ini. Saya mau tahu berdasarkan apa 33, ini digunakan. Tolong dijawab.

Terima kasih.

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
(DONO BOESTAMI):**

Izin Pimpinan.

Jadi sekali lagi kami memperjelas bahwa alokasi dana itu diambil, diputuskan di rapat komite pengarah yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Itu dulu alokasinya. Jadi sejak berdiri, alokasi untuk peremajaan berapa, untuk insentif bio diesel berapa. Izin untuk kami jawab juga untuk insentif bio diesel itu ada sekitar, sejak berdiri 29,2 triliun. Untuk *replanting* itu 2,3 triliun, untuk riset sekitar 246,5 miliar, pengembangan SDM tadi untuk beasiswa dan lain sebagainya itu 121,3 miliar, untuk sarana dan prasarana itu 1,2 miliar. Untuk promosi ini untuk termasuk juga,

**F-PKS (drh. SLAMET):**

Intrupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Biar dijawab dulu nanti kita maksimalkan rapat jam 13.30 kita skors Pak untuk ishoma ya, biar jelas dulu Pak Slamet.

**F-PKS (drh. SLAMET):**

Justru maksud saya begini Pimpinan, itu kan menyangkut pertanyaan saya bahkan saya minta 3 tahun ke belakang gitu. Kalau dijelaskan juga kita gak bisa detil dalam pengawasan, sehingga minta dimasukkan dalam kesimpulan rapat bahwa kita minta data 3 tahun terakhir ke belakang untuk kemudian nanti dalam fungsi pengawasan kita. Tetapi tetap harus kita munculkan dalam rapat nanti kita bahas. Itu usulan saya.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Silakan di jawab Pak dengan Pak Dirjen nanti.

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
(DONO BOESTAMI):**

Boleh.

Yang terakhir, angka promosi sekitar 177,3 miliar. Mohon izin Pimpinan, untuk 3 tahun terakhir kalau boleh kami jawab secara tertulis saja Pak karena angka cukup detil. Kami ada *financial highlight* hanya saja kami tidak *print* angka untuk 3 tahun terakhir.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Silakan Pak Dirjen.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pertama kami sampaikan,

**KETUA KOMISI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan, intrupsi Pimpinan.

Saya minta dijelaskan yang 29 triliun bio diesel ini diberikan kepada siapa? Karena jangan orang kaya tambah kaya yang miskin biarlah mampu, jangan. Saya mau tahu. Kalau perlu nanti usulan teman-teman tadi, ada yang bikin Pansus, ada yang bikin Panja, saya mau tahu dulu. Kalau perlu ditayangkan 29 triliun ini untuk bio diesel ini, angka yang sangat-sangat fantastis sekali. Kebayang tidak, kalau 29 triliun dibelikan bio solar? Untuk mobil diesel untuk solar itu, berapa banyak coba?

Saya minta tolong dijelaskan dulu, kalau perlu nanti dalam kesimpulan dimasukkan Pimpinan. Karena ini saya sendiri bingung, karena tadi Dirjen Perkebunan CPO produknya sekian, Direktur Utama bilang datanya belum pasti. Terus kalau selisih 1 juta, 2 juta saja CPO yang di ekspor atau hasil produksinya sudah berapa berarti kebocorannya? Karena apa? Tadi itu data. Karena kalau datanya gak valid, gimana kita mau menyelesaikan masalah.

Pak Dirut, Pak Dirjen dari Keuangan, Pak Dirjen dari Perkebunan, kami di sini bukan mencari kesalahan, api kita mau mencari solusi. Karena kalau datanya benar pasti akhirnya benar. Kalau datanya dari awal gak benar, pasti gak benar. Karena setahu saya dulu Direktur Utamanya, Bayu itu kan Wamen. Sampai mundur dia. Karena yang saya tanyakan dia, "kena yu, mundur?", "banyak masalah Bang". Oh ya sudah. Maka itu saya sudah mengusulkan 5 tahun terakhir kepada Pimpinan yang lama untuk memanggil tapi sampai hari ini pun belum ada.

Maka saya selaku Pimpinan, saya memanggil, kenapa tidak lebih banyak untuk rakyat *replanting*? Kita tahu *replanting* dengan 25 juta gak cukup lah. Tetapi kita berusaha membantu rakyat. Jangan nanti dibilang wakil rakyatnya kurang pintar. Atau dengan kata lain, gagal paham. Ditanya rakyat mengenai *replanting* dananya gimana, gak tahu. Jadi tolong nanti, entah sekarang dijawab atau nanti diberikan kami tulisan secara detil 39 untuk bio diesel itu kemana kemana kemana, supaya semuanya *clear* Pak.

Saya paham Bapak juga baru dari Keuangan, yang dari Direktur juga baru. Jadi jangan menutupi yang salah kalau ada masa lalu. Masa akan datang apalagi 2020 kita buat semuanya transparan. Ini sesuai dengan perintah dan janjinya Presiden Jokowi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Terima kasih.

Kami persilakan Pak Dirjen, ada tanggapan yang jelas. Mau secara tertulis atau jawaban lisan sekarang. Silakan Pak Dirjen.

Bapak Direktur? Silakan.

**DIRUT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (DONO BOESTAMI):**

Saya kalau boleh mohon izin, kami jawab tertulis. Datanya ada semua dan transparan untuk yang bio diesel dan lain sebagainya.

Terima kasih.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Intrupsi Pak Ketua.

Saya ingin supaya baik dijawab secara langsung lisan maupun juga secara tertulis. Karena secara tertulis itu kadang-kadang anggota tidak terkirim bahannya. Kemudian juga kalau dijawab seperlunya di sini kita bisa dalam lebih lanjut dengan tertulisnya. Jadi supaya kita semua mendengar nih semuanya. Supaya interaksi juga lebih dalam gitu.

Demikian Pak Ketua.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Tadi akan disimpulkan Pak dalam kesimpulan, ada Panja. Pendalaman nanti jawaban tertulis. Kita bahas di Panja, itu kira-kira.

Silakan Pak Dirjen.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):**

Terima kasih Pimpinan.  
*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pertama, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas *feedback*, koreksi, kritikan, dan juga yang sifatnya membangun. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih.

Yang pertama, saya tidak *apple to apple*. Jadi saya rangkum dalam satu jawaban yang barangkali secara umum tadi banyak dilontarkan kepada Pimpinan dan anggota. Nomor satu tentang data. Pak Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian, kami laporkan di rapat kemarin belum sempat kami sampaikan bahwa Pak Ketua untuk data luas tutupan sawit itu artinya luas lahan sawit itu akan terkoreksi oleh satu data dan sudah selesai. Mohon maaf, nanti akan kami segera siapkan data konkritnya untuk disampaikan kepada Komisi IV DPR RI.

Kami sebutkan saja, satu data itu dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian melibatkan Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pertanian, LAPAN, kemudian KLHK, kemudian juga Kehati, dan beberapa mitra lain yang berkaitan dengan data sawit. Dari identifikasi memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Pimpinan, dan Anggota Komisi IV. Memang data sawit ini luar biasa variasinya sehingga memang harus dipersatukan menjadi satu data.

Kami sampaikan misalnya statistik kami, ini soal luasannya 14,3 juta hektar. Ini sebelum terkoreksi, nanti segera saya sampaikan. Kemudian BIG menganalisis, keluar angka 18 juta, kemudian Kehati mengeluarkan angka 15,8 juta. Singkatnya adalah bahwa setiap yang mengeluarkan data, itu adalah berbeda. Karena memang metodologinya berbeda. Kami laporkan tim terintegrasi yang saya sebutkan tadi telah menyelesaikan dan kami sudah menerima datanya dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian karena kita sebagai wali data. Luasnya menjadi, ini sebenarnya kami akan *launch* segera. Tapi ini kami sampaikan saja secara singkat bahwa luasnya berubah.

Dari statistik kami 14,3 itu dari tim terkoordinasi, terintegrasi tadi. Keluar 16,38 juta hektar. Dari data luas areal tutupan itu, kami nanti akan segera mengoreksi luas masing-masing yang ditanyakan oleh Bapak/Ibu Pimpinan dan anggota tadi, swastanya berapa? BUMN nya berapa? Rakyatnya berapa? Itu kami koreksi. Kalau data lama Bapak/Ibu sekalian supaya ada, tadi juga menyampaikan. Sawit ini memang *support* terbesar swasta. Itu 7,8. Ini izin, data lama. Dari 14,3 itu yang belum terkoreksi, itu 7,8 juta itu adalah luas lahan untuk swasta. 5,8 juta itu adalah petani rakyat. Nah baru sisanya kecil sebenarnya 0,7 juta itu adalah BUMN. Dan ini akan kita koreksi berdasarkan satu data tadi 16,38 juta. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan status lahan dari diskusi kita dari RDP yang lalu juga sudah kami sampaikan. Memang betul sekali ini masalah yang sangat pelik. Tadi Pak Darori sampaikan dan juga sudah kami sebenarnya kami tindaklanjuti dengan beberapa komunikasi kami dengan KLHK soal TORA dan sebagainya tadi. Tapi permasalahannya adalah bagaimana nanti untuk merealisasikan ini? kalau catatan KLHK, tadi Pak Darori sesungguhnya perlu kami jelaskan.

Catatan KLHK ada sawit rakyat kita yang masuk di kawasan itu 3 juta hektar. Dari 3 juta itu diselesaikan. Ini informasi kami terima dari Dirjen Planologi, itu 600 ribu diproses. Maksudnya bukan pemutihan ini. Diproses dari status yang tadinya hutan produksi untuk bisa dilepas statusnya supaya itu bisa menjadi status yang bisa dikelola. Tidak menjadi masalah hukum karena statusnya adalah hutan produksi maupun hutan produksi dapat di konversi.

Ini informasi yang kami terima dari Planologi. Tapi terus kami koordinasikan bahwa yang ada di kawasan itu penting untuk segera diselesaikan kalau kita bicara soal PSR tadi. Betul sekali memang ada peluang, tadi saya setuju sekali Pak Darori memberikan masukan untuk bisa mengakses daripa TORA ini. karena di situ ada berjuta-juta lahan yang bisa dimanfaatkan untuk sawit kita.

Kemudian terkait dengan peremajaannya sendiri kami laporkan tadi di awal juga kami sudah jelaskan bahwa kami melakukan rekomendasi teknis. Tentu analisis termasuk target Bapak/Ibu sekalian, Pimpinan, dan anggota kami laporkan juga. Itu setelah kami usulkan targetnya ini, itu ditetapkan oleh Komite Pengarah juga mengenai targetnya ini. Tadinya di 2019 itu ditetapkan 200, lantas dikoreksi menjadi 180 ribu. Nah ini angka perubahan itu yang sehingga kami memberikan satu pandangan untuk bisa terintegrasi.

Tadi sudah ada ide untuk bisa melibatkan *surveyor* atau pihak ketiga seperti yang disampaikan Pak Panggah tadi. Ada upaya untuk mempercepat ini. Kami sampaikan setelah kami melakukan *policy* atau perubahan, revisi daripada persyaratan dan juga simplifikasi prosedur. Kalau kita bandingkan dari 185 di 2018 hanya 33 ribu, kemudian yang 2019 dari 180 sudah 68 ribu itu per Oktober. Kami setelah melakukan komunikasi dan *dashwood* ini Pak, kami dengan daerah. Berapa yang diusulkan oleh daerah. Itu kalau kami hitung bisa mencapai 100 ribu nantinya, di akhir. Tentu 180 belum bisa kami penuhi di 2019 ini.

Saya sangat setuju sekali baik dari Pimpinan maupun anggota menyampaikan memperlancar atau mengintensifkan sosialisasi PSR. Ini terus kami lakukan memang banyak sekali pandangan-pandangan, *feedback*, baik itu dari pihak rakyat, dari pihak perusahaan, PT PN tadi. Nah ini masalahnya beda-beda *feedback*nya. Misalnya soal yang terkait dengan swadaya. Ini menjadi bagian penting untuk kami koordinasikan dengan KLHK. Kalau swadaya itu pada posisi kawasan, ini tentu kami tidak bisa sendiri karena kewenangannya ada di KLHK.

Kemudian yang kedua adalah dengan PT PN. PT PN kami mintakan untuk plasmanya menjadi bagian penting untuk di prioritaskan ada. Tetapi memang ini soal, pertama, evaluasi kami persyaratan yang ada 14 memang sangat menyulitkan maka kami simplifikasi. Itu pun tadi dari Bapak/Ibu Pimpinan dan anggota bisa dipangkas lagi. Kami akan kaji lagi. Kalau memang menyangkut tentang syarat-syarat yang masih bisa dihilangkan,



tentu kami akan akomodir untuk itu karena memang prinsipnya adalah simplifikasi itu harus bisa meningkatkan akses daripada rakyat.

Prinsipnya juga bahwa ini PSR, ya memang alokasinya untuk sawit rakyat, gitu. Tapi kerjasama dengan PT PN juga menyangkut masalah pengerjaannya, Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu anggota. Kami sampaikan juga pengerjaannya karena tidak, belum semua entah itu koperasi, entah itu kelompok pekebun atau tani itu mampu mengerjakan sendiri. Nah ini di swakelola kan kepada, termasuk kerjasama kemitraan dengan PT PN untuk melakukan penanamannya itu proses fisiknya, teknisnya.

Kemudian yang berkaitan dengan usulan, tadi ada usulan berkaitan dengan apakah bisa tidak sekedar hanya *replanting*, tapi juga perluasan. Lah memang ini judulnya ini khusus untuk *replanting*. Kami sampaikan dari 2,54 juta potensi dari *replanting* itupun juga kami koreksi dengan data 16,38 juta hektar. Itupun masih berat, besar sekali. Tetapi bukan tidak mungkin kalau seandainya dananya BPDPKS, nanti kami mohonkan juga Pak Dirut merespon ini karena ini penting juga khususnya pada daerah-daerah atau wilayah baru yang sangat komit terhadap pengembangan sawit. Misalnya daerah Timur, di Sulawesi banyak sekali yang mengusulkan juga berkaitan dengan perluasan bukan peremajaan. Tetapi kami sampaikan kepada mereka, Pimpinan di Pemerintah Daerah untuk kita selesaikan dulu peremajannya. Jadi kalau memungkinkan buat kita, sangat memungkinkan.

Kemudian yang berkaitan dengan status termasuk daripada aspek hukum yang terjadi. Tadi banyak juga disampaikan kesulitan daripada PSR ini mengakses karena permasalahan-permasalahan yang kami sampaikan tadi. Permasalahan yang berkaitan dengan kawasan, permasalahan yang berkaitan dengan status lahannya, permasalahan yang berkaitan dengan tumpang tindih izin. Itu juga menjadi *concern* kami. Meskipun izin itu ada di daerah, kami berkewenangan untuk bisa mensupervisi, mengawasi, sehingga perizinan-perizinan itu bagian penting yang juga kami kontrol untuk ditetapkan ini layak apa tidak. Meskipun nanti ada di kabupaten maupun di provinsi.

Kemudian yang berkaitan dengan lebih khusus lagi kaitannya dengan penempatan daripada PSR tadi. Kami tadi melaporkan untuk ada Lembaga *surveyor* yang bisa dilibatkan di dalam konteks percepatan ini. Dan memang kami berdua dengan BPDPKS. BPDPKS sudah membuat satu *pilot project* yang pengerjaannya itu fokus dikerjakan oleh *surveyor*. Dan itu saya kira sangat membantu percepatan.

Kemudian yang lain yang kaitannya dengan teknis daripada peremajaan itu sendiri. Tadi Pak Pimpinan juga sampaikan, kami akan sampaikan data tertulis dan data itu nanti akan kami rekonsiliasikan dengan BPDPKS supaya ada data yang sama khususnya yang berkaitan dengan target dan realisasinya. Tadi sudah kami sampaikan, memang ada *delay* antara rekomtek (rekomendasi teknis) dengan *transfer* daripada BPDPKS yang prinsipnya bahwa *online* sistem yang sudah dibangun tadi adalah merupakan indikasi bahwa itu segera bisa diproses, kira-kira begitu.

Nah kemudian tadi Pak Krisantus menanyakan, kami juga sudah mendetilkkan data per kabupaten, Pak Krisantus. Nanti kami sampaikan di Kalbar itu mana saja. Ini kalau boleh saya sebut mulai dari Landak, Sanggau, Ketapang, Melawi, dan seterusnya nanti luasannya berapa. Justru kami mendorong daripada Pemerintah Daerah untuk juga mempercepat daripada proses ini. Kami itu melakukan setiap bulan, Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian para anggota. Itu jemput bola. Jadi selain daripada *workshop* verifikasi di akhir bulan, kami di tengah bulan itu ke daerah untuk jemput bola.

Seandainya ini contohnya saja yang paling barangkali paling tidak masuk di dalam catatan Bapak/Ibu di Komisi IV. Misalnya tentang rekening bank. Nah itu setelah kami evaluasi, rekening memang dimiliki, Pak Krisantus. Ini Bapak/Ibu yang lain. Tapi ternyata sudah lama tidak digunakan. Kami masih me *record* itu. Itu sebagai *feedback* kami sehingga kami harus cek benar apakah itu aktif sehingga Pak Dirut ini kesulitan “Iho ini Pak Dirjen, ada rekening kok kami gak bisa *transfer*” akhirnya begitu. Nah ini bagian daripada perbaikan kami khususnya untuk persyaratan rekening. Dan itupun sampai segitu kami harus terjun.

Kalau dari perkembangannya, meskipun sangat jauh kami mohon maaf untuk tidak bisa memenuhi harapan Komisi IV. Tapi kami bekerja keras untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan tadi dengan berbagai terobosan-terobosan. Tidak hanya dikerjakan sendiri tapi (suara tidak jelas). Jadi sekali lagi, ini yang secara umum boleh kami rangkum dari berbagai pertanyaan dari Pimpinan maupun dari Anggota Komisi IV DPR RI tadi.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.*

**F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Intrupsi Pimpinan.

Saya ada data yang saya minta Pak yang memang dari dulu itu sangat kita inginkan. Mengenai data produksi CPO Pak. ini kan sebenarnya relative lebih mudah. Mungkin hanya meregister tangka-tangki timbun baik yang ada di perusahaan swasta, maupun BUMN, maupun di pelabuhan, dan lain-lain sehingga kita selalu *ter-update* gitu ya, data di *real time* untuk stok CPO kita itu berapa, produksi berapa.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):**

Itu yang dari dulu sebenarnya menjadi keinginan kita untuk merealisasikan itu. Kan biayanya ada nih dari Pak Dono, gimana Pak? prinsipnya saya setuju tetapi izinkan kami bisa dari (suara tidak jelas) setelah luas tutupan tadi kita tetapkan. *Step* berikutnya ini kami dengan DPR nanti akan menetapkan produktivitas sawit per hektarnya berapa. Kalau saat ini

catatan kita sekitar 3,6 ton per hektar. Itu baru produktivitas sawit Pak ya. Nah dan saya pun nanti minta itu.

Sekarang itu data-data di tangka-tangki itu Pak bukan data hitungan masing-masing produktivitas itu. Kami prinsipnya setuju Pak nanti di berbagai upaya kami akan melakukan termasuk saran dari Pak Panggah tadi untuk mencatat karena itu yang *real*. Saya ingin sekali itu, juga sekaligus menjadi bahan *crosscheck* itu, masih kita dalam berapa (suara tidak jelas) CPO kita.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Ketua?

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Silakan Pak.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Izin Pak Ketua.

Karena saya ingin tentang kejelasan persiapan menghadapi gugatan ini. Yang kedua, saya minta kejelasan kenapa terjadi penambahan luas lahan dari 14,3 tadi ya? Menjadi 16. Jadi (suara tidak jelas) apa yang diambil (rekaman tidak jelas)

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

(suara tidak jelas) kalimat ini ada “harga” juga. Coba, “penetapan harga untuk komoditas perkebunan tertentu”. “penetapan kebijakan pajak atau tarif pengaturan kelancaran distribusi”. Jadi semua pasal Pak ya? Semua ayat.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc):**

Izin Pak Pimpinan.

Kalau diperkenankan, itu sudah menjad *highlight* yang harus diperhatikan Pemerintah. (suara tidak jelas) Pemerintah nanti memproses, pasti me-*refer* ke sini saja. Tidak usah di *stated*. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ada upaya lain yang perlu dilakukan oleh Pemerintah menyangkut masalah diplomasi dan lobi tadi. Itu ditambahkan dalam ini Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

“Tentang perkebunan selanjutnya Pemerintah”

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Ya, ditambahkan di situ Pak Ketua.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

“Dan melakukan upaya diplomasi”

“Komisi IV” dihapus. “selanjutnya Pemerintah berkewajiban ikhtiar upaya diplomasi untuk memperluas pasar dunia, kepala sawit khususnya bagi pasar Eropa dan Amerika”. “Pasar Eropa dan Amerika” Pak?

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):**

Menurut saya “dunia.” (suara tidak jelas) nanti *rigid* Pak, nanti.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Semua pasar tidak menyebut Eropa dan Amerika. Sudah gudangnya di sana Pak. Ini jeruk minum jeruk nanti. Gak ketemu harga. “Pasar kelapa sawit dunia.” Sudah? Saya ulangi Pak.

2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas perkebunan yang menguntungkan bagi pelaku usaha perkebunan sesuai dengan amanat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selanjutnya Pemerintah berkewajiban melakukan upaya atau ikhtiar diplomasi untuk memperluas pasar kelapa sawit dunia.

Yang terhormat, setuju? Sepakat? Pak Dirjen?

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc.):**

Setuju Pak.

**(RAPAT: DISETUJUI)**

**F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Intrupsi Pak.

Mungkin itu perlu ditekankan. Ini kan ada masalah target-target dari pelaksanaan program yang selalu jauh di bawah capaiannya gitu. Capaiannya selalu di bawah targetnya. Ini pokok utamanya adalah menurut saya kesiapan dari Dirjen Perkebunan yang kurang ini. Kalau soal dananya, ada. Ini saya kira menurut saya perlu ditekankan di sini Pak. Bukan masalah penyaluran dananya itu tidak mencukupi Tapi menurut saya kesiapan daripada pihak Dirjen Perkebunan yang tidak bisa mengantisipasi adanya dana itu, gitu.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):**

Izin Pak.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Silakan komentar Pak.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc.):**

Saya setuju dibuat satu poin lagi untuk meminta kepada Pemerintah c.q. Dirjen Perkebunan untuk melakukan realisasi yang sesuai dengan target atau bagaimana. itu tadi Pak, yang disampaikan Pak Panggah itu satu poin lagi.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Perluasan lah, perluasan produksi?

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):**

*Ndak* ini kan antara target dan realisasi jauh Pak. Maksud beliau itu kesiapannya supaya..

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Memaksimalkan?

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc.):**

Iya itu. Masuk dalam kesimpulan Pak.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Poin baru saja Pak, poin baru. Biar *ndak*. Silakan ke-3 dulu, nanti masuk 6.

Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menyerahkan data alokasi dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun sejak BPDPKS dibentuk selambat-lambatnya 2 hari setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.

Sanggup Pak? Kenapa? Tapi sanggup Pak? Sepakat?

**(RAPAT: DISETUJUI)**

**KETUA KOMISI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan.

Saran saya jangan 2 hari lah. 2 hari juga anggota dewannya sudah reses.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

mau dibawa reses katanya Pak.

**KETUA KOMISI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Mau dibawa reses? Pasti? 2 hari itu buang Rabu anggota dewan nya sudah berangkat reses.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Besok bisa Pak? Karena ada Paripurna nih teman-teman ini.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc.):**

Bisa, bisa.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Sudah sanggup ini Pak

3. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah melalui BPDPKS agar dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun, digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan /atau sarana dan prasarana perkebunan sesuai dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Setuju? Sepakat Pak?

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc.):**

Sepakat Pak.

Tapi ini diperintahkan, apakah perlu disimpulkan? Justru menurut saya tadi penekanannya pada percepatan realisasi itu, menurut pendapat saya ini, mohon maaf.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Ini penegasan agar supaya Bapak tidak berbicara biodiesel lagi. Ini penegasan agar supaya Amanah Undang-Undang ini benar-benar dijalankan oleh eksekutif.

Sepakat ya?

**(RAPAT: DISETUJUI)**

4. Komisi IV DPR RI bersepakat akan membentuk Panja (Panitia Kerja) tentang kelapa sawit yang akan membahas mengenai permasalahan terkait pengembangan komoditas kelapa sawit dari hulu hingga Hilir.

Karena tadi ada 5 anggota yang mengusulkan.

Setuju ya? Sepakat Pak? Ya harus sepakat.

**(RAPAT: DISETUJUI)**

5. tadi usulan dari mantan dewan pengarah ini, yang sekarang menjadi pengawas.

**F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Komisi IV DPR RI “meminta” bukan “mendukung” kepada Pemerintah untuk dapat melaksanakan target-target itu “percepatan target-target yang telah ditetapkan dengan membuat perencanaan yang baik” gitu loh.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc.):**

“Realisasi peremajaan sawit rakyat sebagaimana target yang telah ditetapkan”. Ada tambahan Pak, ditulis semua saja yang “sudah di amanah kan dalam Undang-Undang” tadi kan ada tuh. Ada riset, sarana prasarana. Itu tidak hanya peremajaan. Tai dikoreksi oleh Pak pimpinan juga. Dan sebenarnya, diteruskan dulu saja. Termasuk “optimalisasi realisasi target peremajaan sawit rakyat, sarana prasarana”

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Tadi kan termasuk Pasal 71 itu Pak.

**DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M. Sc.):**

Ini kan sekarang percepatannya, realisasinya Pak. Karena memang juga seperti sarana prasarananya juga masih jauh. Dari target yang telah ditetapkan. Itu di *copy* boleh “realisasi pengembangan SDM, penelitian dan

pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan /atau sarana prasarana.”

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Silakan Pak.

Sebentar, itu menjadi 5 ya? Ditukar? Oh ya. Panjangnya terakhir.  
Silakan Pak.

**DIRJEN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN (Dr. ANDIN HADIYANTO, S.E., M.A.):**

Iya Pimpinan, untuk yang Panja dari, kita sangat *supportive* melihat sawit dari hulu ke hilir. Jadi barangkali ini juga nanti melibatkan antar Komisi barangkali. Karena sawit dari hulu ke hilir itu ada kaitannya dengan pertanian, perdagangan, perindustrian, keuangan, BUMN.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Kalau sudah komisi terkait itu nanti Pansus Pak. Melebar nanti, nanti kita Komisi IV dulu Panja. Kalau belum kelar Panjangnya baru Pansus. Panja saja dulu. Nanti sakit semua nanti semua.

**KETUA KOMISI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan.

Hanya masukan tadi Pak Dirjen dari Keuangan. Betul apa yang dikatakan Pimpinan. Kalau kita bikin Pansus nanti takutnya Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, pejabat yang lama panas dingin. Karena kami harus melibatkan Komisi III bagian Hukum termasuk juga kejaksaan dan lain-lain. Jadi Panja dulu, kita membenahi internal dulu. Kalau memang tidak cukup, baru kita naikkan ke statusnya. Tapi kalau Pansus, kalau bisa jangan lah. Ya Pak?

Kalau nanti masalah rapat gabungan, rapat gabungan misalnya meminta Komisi VI Perindustrian, kemudian Komisi VII ESDM, bisa. Nanti kita buat surat ke Pimpinan, Pimpinan yang minta ke Komisi terkait. Ya Pak ya?

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Nanti ada kalau Pansus ada yang merekomendasikan ke KPK, Kepolisian, Kejaksaan, kan sakit semua nanti. Kan kita sepakat tadi akan Panja, cukup Panja kita. Nanti banyak. Panja Bulog dan seterusnya.

**KETUA KOMISI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Intrupsi Pimpinan.



**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Kita bahas ini dulu Pak Bambang. Ini diputus dulu.

**F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):**

*Ndak* tadi, usul dari Pak Dirjen Keuangan itu judulnya jangan komoditas kelapa sawit dari hulu sampai ke hilir. Ini terlalu luas menurut beliau. Jadi kalau kelapa sawit mungkin tidak seluas itu. Saya kira itu Pak Dirjen?

**DIRJEN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN (Dr. ANDIN HADIYANTO, S.E., M.A.):**

Maksud kami untuk misalnya Panja di dalam suatu komisi ini membahas dari hulu ke hilir sehingga tadi disampaikan Pak Sudin kalau memang ada rapat koordinasi dengan komisi lain ya bisa. Jadi mungkin ini bagus juga.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Ya nanti itu urusan internal kita Pak, nanti.

Kita baca dulu kesimpulan nomor 5 ya. Karena tadi ditukar saja kesimpulan 5 menjadi 6.

Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan optimalisasi dan realisasi target untuk pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan /atau sarana dan prasarana perkebunan sesuai dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Setuju?

**(RAPAT: DISETUJUI)**

**KETUA KOMISI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan, intrupsi Pimpinan.

Terakhir Pimpinan. Ini bukan masalah kesimpulan. Tanggal 10 Desember 2019 Pak Jokowi ada Rakor dengan Menko EKUIN targetnya 500 ribu, tapi gak tahu berapa puluh tahun. Sampai-sampai Perpres Nomor 15 dirubah. Jadi Perpres nya langsung dirubah jadi Perpres Nomor 66. Perpres 66 akan diganti karena untuk percepatan *replanting*. Itu yang pertama.

Yang kedua, kepada Saudara Dirut tadi dikatakan data termasuk 19 perusahaan tadi Pak, 19 perusahaan yang menerima. Karena saya khawatir volumenya tidak sesuai dengan dana yang dikucurkan. Karena setelah dapat dana ini, saya selaku Pimpinan Komisi IV akan langsung konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Itu Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

**Bapak/Ibu yang saya hormati.**

Sebelum kami menutup rapat pada siang hari ini, izinkan kami atas nama Pimpinan dan segenap DPR RI Komisi IV menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Dan semua apa yang kita simpulkan, kita sepakati bersama untuk menjadi tindak lanjut bersama.

Yang terakhir tadi ada saran, manakala Bapak Dirjen atau eselon I berkunjung ke wilayah dari Sabang sampai Merauke. Minimal tanpa surat Pak, hubungi WhattsApp melalui WhattsApp. Itu lebih cepat. Beliau tidur, *insyallah* terbangun. Minimal 1x24 jam. Kalau 3 kali pertemuan, sebelum 3 jam sebelum pertemuan *insyaallah* para Bapak dan Ibu sekalian tidak akan bisa hadir dan merasa tidak dihargai.

Salam hormat saya kepada Pak Menteri dan seluruh pejabat eselon I manakala ke daerah seyogyanya para Bapak dan Ibu mitra ini untuk dihadirkan untuk bersama-sama. Minimal wajahnya kelihatan lah di para pemiliknya sebagaimana Pak Edward tadi dan Pak Suhardi menyampaikan.

Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin.  
Rapat Kerja pada hari ini kami nyatakan ditutup.

**(RAPAT: DITUTUP PUKUL 14.30 WIB)**

Jakarta, 16 Desember 2019

a.n. Ketua Rapat,  
Sekretaris Rapat

Ttd.

**Drs. Budi Kuntaryo**  
NIP. 196301221991031001